

Keberlakuan Klausula *Security Exceptions* dalam *Perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* di Masa Pandemi Covid-19

Daniel Nicholas Putra¹, Yetty Komalasari Dewi²

Abstract

WTO commitments, particularly related to intellectual property rights in the TRIPS Agreement, could potentially hinder efforts to increase access to medicines and vaccines during the Covid-19 pandemic. In time of emergency, these commitments can be overridden using the WTO security exceptions clause. This article compares the WTO security exceptions to general exceptions in Article XX of the GATT 1994 and non-precluded measures in the Argentina-US BIT, India-Germany BIT, and India-Mauritius BIT, and analyses how the Covid-19 pandemic can be a valid reason to waive the obligations under the TRIPS Agreement using the security exceptions clause. In particular, this article discusses how this pandemic has resulted in an “emergency in international relations” and the waiver of obligations in the TRIPS Agreement for public health and safety qualify as “essential security interests”.

Keywords: security exceptions; TRIPS Agreement; intellectual property rights; Covid-19

Abstrak

Komitmen-komitmen WTO, khususnya terkait hak atas kekayaan intelektual dalam Perjanjian TRIPS, berpotensi menghambat peningkatan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dalam situasi pandemi Covid-19. Dalam keadaan darurat, komitmen-komitmen tersebut dapat dikesampingkan menggunakan klausul *security exceptions* WTO. Tulisan ini membandingkan pengaturan *security exceptions* WTO dengan *general exceptions* di Pasal XX GATT 1994 dan *non-precluded measures* di BIT Argentina-AS, BIT India-Jerman, dan BIT India-Mauritius, dan menganalisis bagaimana pandemi Covid-19 dapat menjadi alasan yang sah untuk mengesampingkan kewajiban dalam Perjanjian TRIPS menggunakan klausul *security exceptions*. Secara khusus, tulisan ini membahas bagaimana pandemi ini telah mengakibatkan sebuah “*emergency in international relations*” dan bahwa pengesampingan kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian TRIPS bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat memenuhi syarat sebagai “*essential security interests*”.

Kata Kunci: *security exceptions*; TRIPS; hak atas kekayaan intelektual; Covid-19

¹ Alumnus Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Email: danielnp99@gmail.com Tulisan ini merupakan ekstraksi dan pendalaman dari riset dalam bentuk skripsi dengan judul “Penggunaan Klausul *Security Exceptions* untuk Mengesampingkan Kewajiban dalam *Perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* Selama Pandemi Covid-19” di bawah bimbingan Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I, tanggal sidang 5 Agustus 2021.

² Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Email: yeti.komalasari@ui.ac.id

I. Pendahuluan

Di era globalisasi di mana negara-negara berlomba untuk menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain, timbul kekhawatiran mengenai bagaimana negara dapat menyeimbangkan kegiatan-kegiatan ekonomi dengan pemenuhan hak-hak utama penduduknya.³ Akibat jumlah perjanjian-perjanjian ekonomi yang terus berkembang tersebut, timbul kekhawatiran mengenai bagaimana negara dapat menyeimbangkan kegiatan-kegiatan ekonomi dengan pemenuhan hak-hak utama penduduknya; salah satunya adalah hak atas pemenuhan standar kesehatan yang optimal, atau hak atas kesehatan.⁴

Tantangan terkini bagi negara-negara dalam melindungi kesehatan masyarakatnya tanpa memperburuk ekonomi dan perdagangan adalah kemunculan penyakit *novel coronavirus* (“Covid-19”),⁵ yang dinyatakan sebagai sebuah bencana pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020.⁶ Negara-negara mengambil langkah-langkah karantina atau pembatasan sosial demi membatasi penularan Covid-19, yang serta merta menyebabkan penurunan kapitalisasi pasar di hampir seluruh sektor perdagangan.⁷ Pembatasan sosial tentunya sangat mempersulit pemulihan sektor ekonomi serta memperburuk nasib masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk “bekerja dari rumah,”⁸ sehingga penelitian, pengembangan, serta pendistribusian vaksin secara global menjadi prioritas utama bagi lembaga penelitian publik, *public-private partnership*, dan industri farmasi saat ini.⁹

Aspek hukum perdagangan internasional yang berhubungan erat dengan pengembangan obat-obatan esensial seperti vaksin Covid-19 adalah perlindungan Hak atas

³ Pada bulan Desember 2021, terdapat lebih dari 350 perjanjian dagang regional atau *Regional Trade Agreement*, dan lebih dari 2200 perjanjian investasi bilateral atau *Bilateral Investment Treaty* (“BIT”) yang masih berlaku, dan 80-90% di antara perjanjian-perjanjian tersebut baru mulai berlaku pada tahun 1990 ke atas. World Trade Organization, *RTAs in force*, <<http://rtais.wto.org/UI/PublicAllIRTAList.aspx>>, diakses tanggal 24 Desember 2021; United Nations Commission on Trade and Development, *International Investment Agreements Navigator*, <<https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements>>, diakses tanggal 24 Desember 2021.

⁴ Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, *The Right of Everyone to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health*, E/CN.4/2004/49/Add.1, (2004), hlm. 6.

⁵ World Health Organization, *Novel Coronavirus*, <https://www.who.int/docs/default-source/coronavirus/situation-reports/20200130-sitrep-10-ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480_2#:~:text=The%20final%20name%20of%20the,on%20Taxonomy%20of%20Viruses>, diakses tanggal 24 Desember 2021.

⁶ World Health Organization, *Timeline of WHO's Response to COVID-19*, <<https://www.who.int/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline>>, diakses tanggal 24 Desember 2021.

⁷ McKinsey & Company, *COVID-19: Implications for Business*, <<https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business#>>, diakses tanggal 24 Desember 2021.

⁸ United Nations Development Programme, *COVID-19: Looming Crisis in Developing Countries Threatens to Devastate Economies and Ramp Up Inequality*, <https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/COVID19_Crisis_in_developing_countries_threatens_devastate_economies.html>, diakses tanggal 24 Desember 2021.

⁹ National Institute for Health Research, *COVID-19 Vaccine and Therapies Research Boosted by Six New Projects in £10.5 Million Rapid Funding Round*, <<https://www.nihr.ac.uk/news/covid-19-vaccine-and-therapies-research-boosted-by-six-new-projects-in-105-million-rapid-funding-round/24489>>, diakses tanggal 24 Desember 2021; International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Association, *Pharma Partners in Efforts to Give Coronavirus Vaccine for Everyone*, <<https://www.ifpma.org/resource-centre/pharma-partners-in-efforts-to-give-coronavirus-vaccine-for-everyone/>>, diakses tanggal 24 Desember 2021.

Kekayaan Intelektual (“**HKI**”).¹⁰ Berdasarkan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau Perjanjian TRIPS, Anggota *World Trade Organization* (“**WTO**”) wajib melindungi produk atau proses farmasi yang baru, inventif, dan dapat diterapkan dalam industri berdasarkan undang-undang paten domestik masing-masing negara, yang memberikan pemilik hak eksploitasi eksklusif selama 20 tahun.¹¹ Pemberian paten atas proses farmasi atau atas produk obat-obatan itu sendiri memberikan pemegang paten hak monopoli atas penggunaan proses atau pembuatan dan penjualan obat-obatan tersebut.¹² Alasan terbesar dari pemberian paten adalah sebagai insentif bagi inovasi dan untuk menutup biaya penelitian dan teknologi yang sangat tinggi dengan memberikan pemegang paten kesempatan menjual obat-obatan pada harga yang tinggi pula.¹³ Perlindungan paten ini tentunya berpotensi mempengaruhi akses ke obat-obatan dan membatasi hak atas kesehatan, terutama kewajiban memastikan ketersediaan dan keterjangkauan obat-obatan esensial,¹⁴ dan hal ini turut menjadi pertimbangan dalam penerapan Perjanjian TRIPS.¹⁵

Dalam konteks Covid-19, terdapat usulan pengesampingan HKI demi meningkatkan akses terhadap obat-obatan esensial dan penanganan Covid-19; salah satu sarana yang diusulkan adalah melalui Pasal 73(b) Perjanjian TRIPS.¹⁶ Pasal 73(b) Perjanjian TRIPS adalah klausul pengecualian yang juga terdapat dalam perjanjian-perjanjian WTO seperti *General Agreement on Tariffs and Trade* (“**GATT**”) 1994¹⁷ dan *General Agreement on Trade in Services* (“**GATS**”)¹⁸, bersama-sama dikenal dengan sebutan klausul *security exceptions*.¹⁹ Klausul ini tidak pernah sekalipun digunakan oleh anggota GATT 1947 dan WTO selama 70 tahun keberadaannya, dan baru digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 2017 dan 2018.²⁰ Dalam beberapa sengketa, lembaga penyelesaian sengketa WTO atau *WTO Dispute Settlement Body* (“**WTO-DSB**”) diminta untuk memperjelas arti dan

¹⁰ Frederick Abbott, “The ‘Rule of Reason’ and the Right to Health: Integrating Human Rights and Competition Principles in the Context of TRIPS,” dalam *Human Rights and International Trade*, eds., Thomas Cottier, Joost Pauwelyn dan Elisabeth Bürgi Bonanomi (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm. 283-284; Sisungu, “The Right to Health, Intellectual Property, and Competition Principles,” dalam *Human Rights and International Trade*, eds., Thomas Cottier, Joost Pauwelyn dan Elisabeth Bürgi Bonanomi (Oxford: Oxford University Press, 2005), hlm. 306-307.

¹¹ Organisasi Perdagangan Dunia, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), *UNTS* 1869 (1994), Ps. 27 dan 33 (“**Perjanjian TRIPS**”).

¹² Musungu, “The Right to Health”, hlm. 306; lihat Perjanjian TRIPS, Ps. 28.

¹³ Musungu, “The Right to Health”, hlm. 306.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 307.

¹⁵ Abbott, “Rule of Reason”, hlm. 283.

¹⁶ Carlos Correa, *COVID-19 Pandemic: Access to Prevention and Treatment Is a Matter of National and International Security*, <<https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Open-Letter-REV.pdf>>, diakses tanggal 24 Desember 2021: “*Any commercial interest supported by the possession of intellectual property rights on those technologies must not take precedence over saving lives and upholding human rights ... I wish to recall that in accordance to the ‘Security exceptions’ contained in Article 73(b) of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), any World Trade Organization Member can take ‘any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests’.* The use of this exception will be fully justified to procure medical products and devices or to use the technologies to manufacture them as necessary to address the current health emergency.”

¹⁷ Organisasi Perdagangan Dunia, *General Agreement on Tariffs and Trade* 1994, *UNTS* 1867 (1994), Ps. XXI (“**GATT 1994**”).

¹⁸ Organisasi Perdagangan Dunia, *General Agreement on Trade in Services*, *UNTS* 1869 (1994), Ps. XIVbis (“**GATS**”).

¹⁹ Tania Voon, “The Security Exceptions in WTO Law: Entering a New Era,” *AJIL Unbound* 113 (2019), hlm. 45.

²⁰ *Ibid.*

ruang lingkup klausul *security exceptions* ini.²¹ Frekuensi penggunaan klausul *security exceptions* dalam sengketa WTO berbanding terbalik dengan pengecualian umum atau *general exceptions* WTO dalam Pasal XX GATT 1994 yang lebih sering muncul dalam putusan-putusan WTO-DSB.²²

Tidak hanya dalam perjanjian-perjanjian WTO, klausul *security exceptions* juga tercantum dalam banyak *Bilateral Investment Treaties* (“**BIT**”) dan perjanjian-perjanjian perdagangan multilateral dengan konstruksi yang berbeda-beda.²³ Dalam putusan-putusan *investor-state dispute settlement* (“**ISDS**”), BIT yang sering muncul dalam pembahasan terkait *security exceptions* adalah BIT tahun 1991 antara Argentina dan AS (“**BIT Argentina-AS**”),²⁴ BIT tahun 1995 antara India dan Jerman (“**BIT India-Jerman**”),²⁵ dan BIT tahun 1998 antara India dan Mauritius (“**BIT India-Mauritius**”).²⁶

Akibat keterbatasan kaidah hukum dan kasus-kasus yang tersedia, tulisan ini akan menganalisis lebih lanjut mengenai penafsiran dan penerapan klausul *security exceptions* dalam Perjanjian TRIPS, khususnya dalam konteks pandemi Covid-19. Tulisan ini menjawab permasalahan-permasalahan mengenai (i) bagaimana pengaturan *security exceptions* WTO dibandingkan dengan *general exceptions* di Pasal XX GATT 1994 dan *non-precluded measures* di BIT Argentina-AS, BIT India-Jerman, dan BIT India-Mauritius; serta (ii) apakah pandemi Covid-19 merupakan alasan yang sah untuk mengesampingkan kewajiban dalam Perjanjian TRIPS menggunakan klausul *security exceptions*. Temuan utama dari tulisan ini adalah: Pertama, klausul *security exceptions* WTO memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan *general exceptions* dan *non-precluded measures*; klausul *security exceptions* WTO memberi ruang gerak yang lebih luas bagi negara dalam mengambil tindakan keamanan yang berpotensi melanggar kewajiban WTO asal dilakukan untuk meresponi sebuah “*emergency in international relations*”. Kedua, pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban dalam Perjanjian TRIPS, sebab pandemi ini telah mengakibatkan sebuah “*emergency in international relations*” dan pengesampingan kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian TRIPS bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat memenuhi syarat sebagai “*essential security interests*”.

Tulisan ini terbagi menjadi lima (5) bagian, yang dimulai dengan gambaran umum mengenai klausul *security exceptions* WTO, termasuk menjelaskan penafsiran unsur-

²¹ WTO-DSB, *Russia—Measures Concerning Traffic in Transit*, Request for the Establishment of a Panel by Ukraine, WT/DS512/3 (2017); WTO-DSB, *United Arab Emirates—Measures Relating to Trade in Goods and Services, and Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Request for the Establishment of a Panel by Qatar, WT/DS526/2 (2017); WTO-DSB, *Canada—Additional Duties on Certain Products from the United States*, Request for the Establishment of a Panel by the United States, WT/DS557/2 (2018); WTO-DSB, *United States—Certain Measures on Steel and Aluminium Products*, Request for the Establishment of a Panel by Norway, WT/DS552/10 (2018).

²² World Trade Organization, *Article XX General Exceptions, Analytical Index of GATT*, <https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gatt_ai_e/art20_e.pdf> diakses tanggal 24 Desember 2021.

²³ Katia Yannaca-Small, “Essential Security Interests Under International Investment Law,” dalam *International Investment Perspectives: Freedom of Investment in a Changing World* (s.l.: OECD, 2007), hlm. 94.

²⁴ Traktat antara Amerika Serikat dan Republik Argentina mengenai Dorongan Timbal Balik dan Perlindungan Investasi (Treaty between the United States of America and the Argentine Republic Concerning the Reciprocal Encouragement and Protection of Investment), 14 November 1991 (“**BIT Argentina-AS**”).

²⁵ Perjanjian Antara Republik India dan Republik Federal Jerman untuk Promosi dan Perlindungan Investasi (Agreement between the Republic of India and the Federal Republic of Germany for the Promotion and Protection of Investment), 10 Juli 1995 (“**BIT India-Jerman**”).

²⁶ Perjanjian Antara Pemerintah Republik Mauritius dan Pemerintah Republik India untuk Promosi dan Perlindungan Investasi (Agreement between the Government of the Republic of Mauritius and the Government of the Republic of India for the Promotion and Protection of Investments), 8 September 1998 (“**BIT India-Mauritius**”).

unsurnya berdasarkan keputusan Panel WTO. Selanjutnya, tulisan ini membandingkan unsur-unsur klausul *security exceptions* dengan pengecualian *general exceptions* dalam Pasal XX GATT 1994. Bagian selanjutnya menganalisis persamaan dan perbedaan antara klausul *security exceptions* dengan klausul *non-precluded measures* di BIT Argentina-AS, BIT India-Jerman, dan BIT India-Mauritius. Pada bagian keempat, tulisan ini membahas kemungkinan penerapan klausul *security exceptions* dalam Perjanjian TRIPS dan pemenuhan unsur-unsurnya di konteks pandemi Covid-19. Akhirnya, tulisan ini ditutup dengan kesimpulan terhadap hal-hal yang telah dijabarkan pada bagian-bagian sebelumnya.

II. Analisis dan Pembahasan

1. Klausul *Security Exceptions* WTO

Pengecualian atas dasar keamanan nasional atau *security exceptions* telah melahirkan banyak perdebatan sejak perumusan GATT pertama di tahun 1947, karena konsep keamanan nasional sangat sulit untuk dirumuskan secara objektif dan berkaitan erat dengan kedaulatan negara.²⁷ Delegasi Amerika Serikat (“AS”) yang mencetuskan klausul *security exceptions* ini mengemukakan pentingnya menentukan batasan-batasan keberlakuan klausul tersebut; apabila negara diberikan kewenangan yang luas dan absolut dalam menentukan keberlakuannya, klausul *security exceptions* akan sangat rawan untuk disalahgunakan.²⁸ Oleh karena itu, klausul *security exceptions* dalam GATT 1947 dirancang sedemikian rupa sehingga hanya dapat digunakan dalam keadaan-keadaan tertentu—seperti perang atau keadaan darurat internasional—dan hanya dalam situasi yang telah ditentukan tersebut negara memiliki kewenangan untuk menentukan komitmen mana yang hendak ia kesampingkan.²⁹

Ketentuan *security exceptions* WTO menyalin ulang pengaturan dalam GATT 1947, yang tertulis sebagai berikut:

“Nothing in this Agreement shall be construed:

(a) to require a Member to furnish any information the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests; or

(b) to prevent a Member from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests;

(i) relating to fissionable materials or the materials from which they are derived;

(ii) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in other goods and materials as is carried on directly or indirectly for the purpose of supplying a military establishment;

(iii) taken in time of war or other emergency in international relations; or

(c) to prevent a Member from taking any action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.”

(penekanan ditambahkan)

Terdapat tiga unsur dalam klausul *security exceptions* ini yang seringkali menjadi pokok permasalahan dalam putusan-putusan WTO-DSB, yakni apakah definisi “taken in

²⁷ Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, Preparatory Committee of the United Nations Conference on Trade and Employment, *Thirty-Third Meeting of Commission A*, E/PC/T/A/PV/33 (1947), hlm. 19.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 20: “We recognized that there was a great danger of having too wide an exception and we could not put it into the Charter, simply by saying: ‘by any Member of measures relating to a Member’s security interests,’ because that would permit anything under the sun.”

²⁹ Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Second Session of the Preparatory Committee of the United Nations Conference on Trade and Employment*, E/PC/T/189 (1947), hlm. 47.

time of ... emergency in international relations"; definisi "*essential security interests*"; dan penggunaan kata "*it considers necessary*". Ketiga unsur ini menjelaskan dalam situasi apakah *security exceptions* dapat diberlakukan, kepentingan-kepentingan apa yang dapat dilindungi oleh klausul *security exceptions* tersebut, dan siapa yang berwenang meninjau apakah suatu tindakan Anggota WTO yang melawan hak dapat dianggap "*necessary*".³⁰

a. Pengertian Unsur "*taken in time of ... emergency in international relations*"

Dari beberapa situasi keamanan yang menjadi prasyarat berlakunya klausul *security exceptions* WTO,³¹ satu kriteria yang paling sering menjadi pokok persoalan dalam penafsiran *security exceptions* WTO adalah sub-ayat (iii), yang menyatakan: "*taken in time of war or other emergency in international relations*."³² Istilah "*emergency in international relations*" atau "kegentingan dalam hubungan internasional" harus dipahami secara tekstual dan kontekstual, terutama kaitannya dengan kata "*war*" atau "perang". Tidak semua ketegangan atau konflik internasional dapat dikategorikan sebagai "perang" atau "kegentingan dalam hubungan internasional."³³ Istilah "perang" memiliki hubungan yang erat dengan konsep "konflik bersenjata", dan dalam hukum internasional konsep konflik bersenjata ini telah berevolusi sedemikian rupa hingga mencakup konflik antarnegara, konflik non-internasional, serta metode perang termutakhir seperti *cyberwarfare*.³⁴ Sebaliknya, istilah "kegentingan" tidak memiliki definisi baku dalam hukum internasional.³⁵

Penafsiran *emergency in international relations* oleh Panel WTO dalam kasus *Russia—Traffic in Transit* mensyaratkan suatu peristiwa dengan skala yang setara dengan konflik bersenjata, ketegangan atau krisis tingkat tinggi, dan ketidakstabilan umum yang melanda suatu negara secara menyeluruh.³⁶ Dengan demikian, tidak semua perselisihan politik dan ekonomi antarnegara dapat dikategorikan sebagai *emergency in international relations* dalam artian Pasal XXI(b)(iii) GATT 1994.³⁷ Indikator-indikator yang digunakan oleh Panel WTO untuk menemukan suatu *emergency in international relations* antara lain adanya resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai konflik bersenjata antara Ukraina dan Rusia, dan sanksi sepihak negara-negara lain terhadap Rusia terkait konflik tersebut.³⁸

Pertimbangan-pertimbangan Panel WTO dalam kasus *Russia—Traffic in Transit* ketika menafsirkan Pasal XXI GATT 1994 kemudian dikonfirmasi oleh Panel WTO dalam kasus *Saudi Arabia—Protection of IPR* dalam menafsirkan Pasal 73 Perjanjian TRIPS, dan pendekatan ini disetujui oleh para pihak yang bersengketa.³⁹ Panel WTO dalam *Saudi Arabia—Protection of IPR* menemukan adanya situasi ketegangan atau krisis tingkat tinggi yang berlangsung antara Arab Saudi dan Qatar, yang dimulai dengan pemutusan hubungan

³⁰ Sebastián Mantilla Blanco dan Alexander Pehl, *National Security Exceptions in International Trade and Investment Agreements: Justiciability and Standards of Review* (Cham: Springer International Publishing, 2020), hlm. 6-10.

³¹ Lihat Pasal 73(b) Perjanjian TRIPS: "(i) relating to fissionable materials or the materials from which they are derived; (ii) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in other goods and materials as is carried on directly or indirectly for the purpose of supplying a military establishment; (iii) taken in time of war or other emergency in international relations."

³² Michael J. Hahn, "Vital Interests and the Law of GATT: An Analysis of GATT's Security Exceptions," *Michigan Journal of International Law* 12 (1991), hlm. 586.

³³ *Ibid.*, hlm. 586-588.

³⁴ Blanco & Pehl, *National Security Exceptions*, hlm. 8.

³⁵ Hahn, "Vital Interests and the Law of GATT", hlm. 587.

³⁶ Panel Report *Russia—Traffic in Transit*, para. 7.76.

³⁷ *Ibid.*, para. 7.74 & 7.75.

³⁸ *Ibid.*, para. 7.122.

³⁹ Panel Report *Saudi Arabia—Protection of IPR*, para. 7.243 & 7.246.

ekonomi dan diplomatik sebagai respon terhadap tuduhan bahwa Qatar mendukung kelompok-kelompok teroris yang beroperasi di wilayahnya.⁴⁰ Dalam kedua kasus ini, Panel WTO mempertimbangkan reaksi umum masyarakat internasional, dan juga proses memburuknya hubungan diplomatik dan ekonomi antara negara-negara yang bersitegang sebagai bukti adanya *emergency in international relations*, sebagaimana tercermin dalam tanggapan PBB dan negara-negara di dunia.

Setelah menetapkan keberadaan suatu *emergency in international relations*, langkah selanjutnya adalah menentukan apakah tindakan Anggota WTO “diambil dalam waktu” kegentingan tersebut.⁴¹ Menurut Panel WTO dalam *Russia—Traffic in Transit*, kriteria ini merujuk pada aspek temporal dari tindakan Anggota WTO yang hendak dijustifikasi menggunakan klausul *security exceptions*.⁴² Anggota WTO cukup menunjukkan adanya keterkaitan secara kronologis antara tindakan yang menjadi pokok sengketa dengan situasi kegentingan yang dimaksud untuk memenuhi kriteria *taken in time of emergency in international relations* dalam klausul *security exceptions* WTO.⁴³

b. Pengertian Unsur “essential security interests”

Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana memaknai istilah “*essential security interests*” secara konkret untuk mencegah penafsiran yang terlalu luas oleh Anggota WTO. Istilah “*security*” secara tradisional merujuk pada kondisi politik atau militer yang dianggap penting oleh negara karena berkaitan dengan kedudukannya sebagai kekuatan dunia, yang mana hal ini berada di luar lingkup pengaturan GATT 1947 dan perjanjian-perjanjian WTO.⁴⁴ Seiring perkembangan dalam hubungan internasional dan ekonomi global, beberapa pengamat berpendapat bahwa kepentingan ekonomi dan kepentingan keamanan tidak selalu mudah dipisahkan; ada saatnya suatu krisis ekonomi benar-benar mengancam keamanan negara sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk “*security interests*”.⁴⁵ Sebagai konsekuensi, “*security interests*” dapat ditafsirkan untuk mencakup ancaman non-militer dan tidak lagi mengacu secara eksklusif kepada ancaman fisik atau militer terhadap integritas suatu negara.⁴⁶ Meskipun demikian, Anggota WTO tetap harus menunjukkan bahwa kepentingan keamanan yang terancam bersifat “*essential*”, menyiratkan suatu derajat kepentingan yang lebih tinggi dari kepentingan keamanan biasa.⁴⁷

Panel WTO dalam kasus *Russia—Traffic in Transit* membedakan konsep “*essential security interests*” dengan kepentingan keamanan biasa.⁴⁸ Frasa “*essential security interests*” secara umum dimaknai sebagai kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan

⁴⁰ *Ibid.*, para. 7.257, 7.258 & 7.263.

⁴¹ GATT 1994, Ps. XXI(b)(iii) & Perjanjian TRIPS, Ps. 73(b)(iii): “... *taken in time of ...*”

⁴² Panel Report *Russia—Traffic in Transit*, para. 7.70 & 7.124.

⁴³ Panel Report *Saudi Arabia—Protection of IPR*, para. 7.269.

⁴⁴ Hahn, “Vital Interests and the Law of GATT”, hlm. 580.

⁴⁵ Dapo Akande dan Sope Williams, “International Adjudication on National Security Issues: What Role for the WTO?” *Virginia Journal of International Law* 43 (2003), hlm. 398, fn. 142; Blanco & Pehl, *National Security Exceptions*, hlm. 9; Diane A. Desierto, *Necessity and National Emergency Clauses: Sovereignty in Modern Treaty Interpretation* (Leiden: Brill Nijhoff, 2012) hlm. 146; Jaemin Lee, “Commercializing National Security? National Security Exceptions’ Outer Parameter Under GATT Article XXI,” *Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy* 13 (2017), hlm. 301–302; Tarcisio Gazzini, “Necessity in International Investment Law: Some Critical Remarks on *CMS v. Argentina*,” *Journal of Energy and Natural Resources Law* 26 (2008), hlm. 463.

⁴⁶ Desierto, *Necessity and National Emergency Clauses*, hlm. 146; David A. Baldwin, “The Concept of Security,” *Review of International Studies* 23 (1997), hlm. 5.

⁴⁷ Blanco & Pehl, *National Security Exceptions*, hlm. 9; Hannes L. Schloemann dan Stefan Ohlhoff, “‘Constitutionalization’ and Dispute Settlement in the WTO: National Security as an Issue of Competence,” *American Journal of International Law* 93 (1999), hlm. 443–445.

⁴⁸ Panel Report *Russia—Traffic in Transit*, para. 7.130.

fungsi-fungsi utama suatu negara, yakni untuk melindungi wilayahnya dan penduduknya terhadap ancaman eksternal, serta memelihara norma hukum dan ketertiban umum secara internal.⁴⁹ Meskipun telah memberikan definisi umum, Panel WTO kemudian mengemukakan bahwa bentuk-bentuk kepentingan yang dapat dikategorikan sebagai “*essential security interests*” hanya dapat ditentukan secara kasus per kasus berdasarkan fakta yang tersedia, sehingga Anggota WTO sudah seharusnya diberikan diskresi untuk menentukan apa yang termasuk dalam “*essential security interests*” mereka.⁵⁰

Dalam *Russia—Traffic in Transit* dan *Saudi Arabia—Protection of IPR*, baik Rusia maupun Arab Saudi selaku negara Anggota WTO pengguna klausul *security exceptions* tidak mengalami kesulitan dalam mengemukakan “*essential security interests*” mereka karena dalam kedua kasus tersebut terdapat situasi perang dan/atau ancaman terorisme; situasi-situasi yang berkaitan erat dengan konsep keamanan secara tradisional.⁵¹ Bagaimanapun juga, definisi yang telah dikemukakan Panel WTO dalam *Russia—Traffic in Transit* dapat mencakup kepentingan-kepentingan keamanan yang bersifat non-militer, dengan syarat bahwa Anggota WTO dapat menunjukkan keterkaitan antara kepentingan keamanan yang terancam tersebut dengan sebuah situasi *emergency in international relations*.⁵²

c. Pengertian Unsur “*it considers necessary*”

Unsur terakhir yakni frasa “*it considers necessary*” atau “sebagaimana dianggap perlu oleh Anggota WTO” dalam klausul *security exceptions* WTO merupakan unsur yang paling sering menimbulkan perdebatan, terutama mengenai kewenangan Anggota WTO dan/atau WTO-DSB dalam memutuskan keberlakuan klausul *security exceptions*, dan seberapa besar diskresi Anggota WTO dalam menentukan tindakan apa yang dianggap *necessary* ketika menggunakan klausul *security exceptions*.⁵³

WTO-DSB telah mengklarifikasi secara tegas mengenai pengertian dari unsur “*it considers necessary*” dalam kasus *Russia—Traffic in Transit*. Panel WTO menolak penafsiran yang memberikan Anggota WTO kewenangan absolut dalam menentukan penerapan *security exceptions*; Anggota WTO tidak memiliki kewenangan sepihak dalam menggunakan Pasal XXI GATT 1994, dan WTO-DSB tetap berwenang meninjau kembali penerapan klausul tersebut.⁵⁴ Tetapi setelah mempertimbangkan teks dari Pasal XXI GATT 1994, Panel WTO dalam kasus ini mengambil sikap bahwa Anggota WTO selaku pemohon *security exceptions* tetap memiliki peran utama dalam menentukan kepentingan keamanan manakah yang terancam dan tindakan apakah yang dianggap “*necessary*” dalam situasi tersebut, dengan catatan bahwa terdapat beberapa batasan terhadap diskresi ini.⁵⁵

Batasan pertama yang ditetapkan Panel WTO terhadap diskresi Anggota WTO berhubungan dengan standar itikad baik; alasan-alasan yang dikemukakan Anggota WTO tidak boleh digunakan semata-mata dengan tujuan mengesampingkan kewajiban WTO yang berlaku demi kepentingan ekonomi negara, sebab GATT 1994 telah menyediakan berbagai mekanisme dan fleksibilitas lain untuk tujuan tersebut.⁵⁶ Batasan kedua terhadap diskresi Anggota WTO adalah sub-ayat (i) - (iii) dalam Pasal XXI GATT 1994 yang ditafsirkan

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, para. 7.131.

⁵¹ Panel Report *Russia—Traffic in Transit*, para. 7.136; Panel Report *Saudi Arabia—Protection of IPR*, para. 7.280.

⁵² Panel Report *Russia—Traffic in Transit*, para. 7.134–7.135.

⁵³ Roger P. Alford, “The Self-Judging WTO Security Exceptions,” *Utah Law Review* (2011), hlm. 704.

⁵⁴ Panel Report *Russia—Traffic in Transit*, para. 7.102–7.103.

⁵⁵ *Ibid.*, para. 7.131.

⁵⁶ *Ibid.*, para. 7.79 & 7.113.

sebagai kriteria yang harus ditinjau berdasarkan fakta-fakta objektif.⁵⁷ Penafsiran Panel WTO ini juga menjadi landasan analisis di *Saudi Arabia—Protection of IPR* terkait penggunaan klausul *security exceptions* di Pasal 73(b)(iii) Perjanjian TRIPS.⁵⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan WTO-DSB dalam meninjau klausul *security exceptions* WTO adalah perpaduan antara standar itikad baik dan peninjauan objektif. Di balik diskresi luas Anggota WTO dalam menentukan tindakan yang dianggap “*necessary*” untuk kepentingan keamanannya, harus diteliti apakah tindakan tersebut benar-benar merespon kepada situasi keamanan dan bukan untuk kepentingan tersembunyi. Lebih lanjut, WTO-DSB dapat meninjau secara objektif apakah situasi keamanan yang disebutkan dalam klausul *security exceptions* WTO telah terpenuhi, termasuk ada tidaknya sebuah “*emergency in international relations*”.

2. Klausul *Security Exceptions* WTO dan Klausul *General Exceptions* dalam Pasal XX GATT 1994

Klausul *security exceptions* WTO memiliki kaitan yang erat dengan klausul *general exceptions* dalam Pasal XX GATT 1994. Kedua klausul ini pada mulanya merupakan satu kesatuan ketika dinegosiasikan oleh negara-negara dalam perundingan GATT 1947, sebelum akhirnya disepakati bahwa kedua pengecualian harus dibuat secara terpisah.⁵⁹

Klausul *general exceptions* dalam Pasal XX GATT 1994 dan klausul *security exceptions* WTO sama-sama dapat digunakan oleh Anggota WTO untuk mengecualikan kewajiban substantif apapun dalam perjanjian-perjanjian WTO.⁶⁰ Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan antara karakteristik kedua klausul yang membuat keduanya harus dirumuskan secara terpisah, baik dari segi pengaturan serta objek dan tujuan yang berbeda dengan klausul *security exceptions*.

Unsur-unsur yang membedakan klausul *general exceptions* dengan *security exceptions* WTO antara lain adalah adanya larangan “*arbitrary or unjustifiable discrimination ... or a disguised restriction on international trade*” dalam Pasal XX GATT 1994, perbedaan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi dalam huruf (a)-(j) Pasal XX GATT 1994 dengan kepentingan “*essential security interests*”, serta keberadaan unsur “*necessary*” dalam Pasal XX GATT 1994 dan bukan “*it considers necessary*”.

a. Perbandingan Antara Unsur Larangan “*arbitrary or unjustifiable discrimination ... or a disguised restriction on international trade*” dengan Standar Itikad Baik

Karakteristik pertama yang membuat klausul *general exceptions* dalam Pasal XX GATT 1994 nampak berbeda dari klausul *security exceptions* WTO adalah keberlakuan asas non-diskriminasi yang dapat ditemukan dalam kalimat pembuka atau *chapeau* dari Pasal XX GATT 1994.⁶¹ Kalimat ini memuat kewajiban untuk tidak menggunakan pengecualian dalam Pasal XX GATT 1994 sebagai justifikasi untuk melakukan diskriminasi yang sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan antara negara-negara dengan kondisi yang sama, atau melakukan pembatasan terselubung dalam perdagangan internasional.⁶² Bagian

⁵⁷ *Ibid.*, para. 7.65 & 7.71.

⁵⁸ Panel Report *Saudi Arabia—Protection of IPR*, para. 7.243.

⁵⁹ Hahn, “Vital Interests and the Law of GATT”, hlm. 567; Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Report of the Tariff Negotiations Working Party*, E/PC/T/135 (1947), hlm. 53–54.

⁶⁰ Krzysztof J. Pelc, *Making and Bending International Rules: The Design of Exceptions and Escape Clauses in Trade Law* (New York: Cambridge University Press, 2016), hlm. 122.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 129–133; Blanco & Pehl, *National Security Exceptions*, hlm. 20.

⁶² GATT 1994, Ps. XX, *Chapeau*: “*Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade...*”

dari klausul *general exceptions* ini mencerminkan prinsip dasar GATT untuk tidak melakukan diskriminasi bahkan dalam situasi-situasi ekonomi yang mendesak.⁶³ Dengan demikian, suatu tindakan Anggota WTO wajib melalui dua tahapan untuk dapat dijustifikasi menggunakan Pasal XX GATT 1994; dipenuhinya salah satu pengecualian yang tercantum dalam Pasal XX (a) – (j) (tahapan pertama), dan juga persyaratan umum yang terdapat dalam *chapeau* Pasal XX (tahapan kedua).⁶⁴

Sebaliknya, Pasal XXI GATT 1994, Pasal 73 Perjanjian TRIPS dan Pasal XIVbis GATS tidak merujuk pada prinsip non-diskriminasi.⁶⁵ Tujuan dari klausul *security exceptions* WTO adalah untuk memungkinkan Anggota WTO berreaksi secara lebih leluasa terhadap situasi krisis internasional atau terhadap aktor-aktor yang mengancam keamanan masyarakat internasional, sehingga prinsip non-diskriminasi berpotensi menghalangi tujuan.⁶⁶

b. Perbedaan Antara Kepentingan-kepentingan yang Dilindungi dalam Pasal XX GATT 1994 dan *Security Exceptions* WTO

Dari segi kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh Pasal XX GATT 1994 dan *security exceptions* WTO, terdapat perbedaan yang signifikan dan tidak saling beririsan. Nilai-nilai yang dilindungi dalam Pasal XX GATT 1994 mengacu pada hal-hal yang berkaitan erat dengan kedaulatan, identitas, dan kewajiban-kewajiban negara terhadap penduduknya, seperti perlindungan moral, lingkungan, budaya, dan lain-lain.⁶⁷ Anggota WTO memiliki hak untuk melindungi kepentingan umum terhadap ancaman yang ditimbulkan dari kegiatan perdagangan bebas, dan Pasal XX GATT 1994 berperan sebagai dasar pengampun bagi Anggota WTO ketika mengambil tindakan perlindungan yang pada dasarnya melanggar peraturan-peraturan dagang.⁶⁸ *Security exceptions* WTO di sisi lain melindungi keberadaan dan keutuhan negara dari ancaman-ancaman fisik yang datang dari luar maupun dalam negeri, sehingga mengecualikan ancaman-ancaman yang datang dari kegiatan komersial.⁶⁹

Putusan-putusan GATT/WTO-DSB memperjelas bahwa sebagai perwujudan konkret dari kepentingan umum, negara memiliki hak untuk memprioritaskan perlindungan terhadap nilai-nilai tersebut dengan mengesampingkan komitmen liberalisasi perdagangan sebagaimana diperlukan.⁷⁰ Sebagai contoh, dalam *Thailand—Cigarettes*, Panel GATT memperbolehkan pembatasan impor barang-barang yang terbukti mengancam kesehatan, seperti produk-produk rokok, sehingga tindakan tersebut diperkenankan berdasarkan Pasal XX (b) walaupun pada dasarnya melanggar larangan pembatasan kuantitatif.⁷¹ Contoh lain dapat ditemukan di kasus *EEC—Regulation on Imports of Parts and Components*, ketika Panel GATT menyatakan bahwa aktivitas perdagangan dapat dibatasi oleh negara anggota

⁶³ Hahn, “Vital Interests and the Law of GATT”, hlm. 594.

⁶⁴ Autar Krishen Koul, *Guide to WTO and GATT: Economics, Law and Politics* (Singapore: Springer, 2018), hlm. 343; Peter van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*, ed. 2 (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2008) hlm. 620–621; Chad P. Bown dan Joel P. Trachtman, “Brazil—Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres: A Balancing Act,” *World Trade Review* 8 (2009), hlm. 117.

⁶⁵ Mark Koulen, “The Non-discriminatory Interpretation of GATT Article XIX(1): A Reply,” *Legal Issues of European Integration* 10 (1983), hlm. 89.

⁶⁶ Hahn, “Vital Interests and the Law of GATT”, hlm. 594; Blanco & Pehl, *National Security Exceptions*, hlm. 20.

⁶⁷ Pelc, *Making and Bending International Rules*, hlm. 126.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 126–127.

⁶⁹ Panel Report *Russia—Traffic in Transit*, para. 7.130.

⁷⁰ GATT, *Thailand—Restrictions on Importation of and Internal Taxes on Cigarettes*, Panel Report, DS10/R - 37S/200 (7 November 1990), para. 72–73.

⁷¹ *Ibid.*, para. 73.

secara selektif dengan tujuan memberi sanksi bagi pelanggaran peraturan perundang-undangan domestik berdasarkan Pasal XX (d), seperti aturan terkait persaingan usaha tidak sehat, walaupun aturan tersebut dapat dilihat sebagai pelanggaran asas *national treatment* atau *most-favored nation treatment*.⁷² Hal-hal ini mencerminkan situasi ketika negara dihadapkan dengan berbagai kepentingan yang saling tumpang tindih, dan dengan demikian Anggota WTO harus menyeimbangkan kepentingan umum dengan kepentingan perdagangan ketika hendak menggunakan Pasal XX GATT 1994 dalam situasi-situasi tertentu, dengan cara menunjukkan bahwa tindakan yang diambil negara tersebut benar-benar diperlukan atau “*necessary*” untuk mencapai taraf perlindungan yang dihendaki.⁷³

Lain halnya dengan kepentingan yang masuk dalam lingkup *security exceptions* WTO. Pada dasarnya tindakan yang diambil untuk melindungi kepentingan-kepentingan keamanan utama tidak perlu diseimbangkan dengan kepentingan perdagangan, sebab Anggota WTO berhak untuk menilai tindakan apakah yang diperlukan dalam situasi kepentingan yang benar-benar memaksa.⁷⁴ Bentuk-bentuk kepentingan keamanan yang dilindungi oleh *security exceptions* WTO juga digantungkan pada diskresi masing-masing Anggota WTO,⁷⁵ sehingga lingkup dari *security exceptions* WTO menjadi lebih luas dibanding kepentingan yang dilindungi Pasal XX GATT 1994, yakni terbatas pada sub-ayat (a) – (j).⁷⁶

c. Perbedaan Antara Unsur “*necessary*” dalam Pasal XX (a), (b), (d) dan (j) GATT 1994 dengan Unsur “*it considers necessary*” dalam Klausul *Security Exceptions* WTO

Karakteristik terakhir yang membedakan klausul *general exceptions* dengan klausul *security exceptions* WTO adalah kriteria dalam sub-ayat (a), (b), (d), dan (j) Pasal XX GATT 1994 yang mensyaratkan bahwa suatu tindakan benar-benar diperlukan atau “*necessary*” untuk memenuhi alasan pengecualian, yakni ketika pertentangan dengan komitmen dagang benar-benar tidak dapat dihindari.⁷⁷ Pasal XX GATT 1994 tidak memiliki definisi baku mengenai konsep “*necessity*” sehingga WTO-DSB harus menafsirkan dan menarik kriteria-kriteria konkret dalam memutuskan apakah suatu tindakan dapat dianggap “*necessary*”.⁷⁸

Konsep “*necessity*” bertujuan untuk meminimalisir sejauh mungkin dampak negatif dari suatu kebijakan Anggota WTO terhadap perdagangan, namun secara bersamaan memastikan bahwa tujuan kebijakan tersebut tetap dapat tercapai.⁷⁹ Dengan demikian, untuk membuktikan bahwa suatu tindakan adalah “*necessary*”, Anggota WTO harus membuktikan bahwa tidak ada alternatif lain yang dapat meminimalisir pembatasan terhadap perdagangan

⁷² GATT, *European Economic Communities—Regulation on Imports of Parts and Components*, Panel Report, L/6657 - 37S/132 (16 May 1990), para. 5.16.

⁷³ GATT, *United States—Restrictions on Imports of Tuna*, Panel Report, DS21/R - 39S/155 (3 September 1991), para. 5.27; Panel Report *Thailand—Cigarettes*, para. 73: “...however, for a measure to be covered by Article XX(b) it had to be ‘necessary’.”

⁷⁴ Panel Report *Russia—Traffic in Transit*, para. 7.131: “The specific interests . . . will depend on the particular situation and perceptions of the state in question . . . For these reasons, it is left, in general, to every Member to define what it considers to be its essential security interests.”

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Pelc, *Making and Bending International Rules*, hlm. 123.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 126; Panel Report *Thailand—Cigarettes*, para. 74.

⁷⁸ Pelc, *Making and Bending International Rules*, hlm. 126–127; Bown & Trachtman, “Brazil—Tyres”, hlm. 86–89.

⁷⁹ Pelc, *Making and Bending International Rules*, hlm. 127.

demikian mencapai tujuan kebijakan yang sama.⁸⁰ Alternatif-alternatif yang tersedia harus dianalisis dengan mempertimbangkan kapasitas Anggota WTO dalam mengambil alternatif tersebut,⁸¹ apakah alternatif tersebut dapat merealisasikan tujuan kebijakan yang hendak dicapai,⁸² serta urgensi dari kepentingan yang hendak dilindungi.⁸³ Apabila alternatif yang diajukan tidak dapat memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka tindakan yang diambil Anggota WTO dapat dikategorikan sebagai *necessary*.⁸⁴

Security exceptions WTO juga memuat kata “*necessary*”.⁸⁵ Tetapi akibat adanya kualifikasi “*if it considers*”, konsep “*necessity*” dalam *security exceptions* WTO tidak lagi membutuhkan analisis menggunakan kriteria-kriteria objektif seperti analisis “*necessity*” dalam Pasal XX GATT 1994 di atas.⁸⁶ Ketika menggunakan klausul *security exceptions*, Anggota WTO memiliki diskresi yang lebih besar untuk menentukan apakah suatu tindakan benar-benar diperlukan.⁸⁷

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan putusan-putusan WTO-DSB dan praktik negara-negara yang menggunakan Pasal XX, klausul *general exceptions* harus ditafsirkan secara sempit.⁸⁸ Hal ini berbeda dengan penerapan *security exceptions* dalam situasi kepentingan dalam hubungan internasional. Anggota WTO memiliki ruang gerak yang lebih luas dibanding ketika menggunakan Pasal XX GATT 1994; Anggota WTO dapat lebih leluasa mengemukakan kepentingan keamanan yang hendak dilindungi serta menentukan tindakan apa yang dianggap “*necessary*” untuk melindungi kepentingan tersebut tanpa melanggar peraturan dagang.⁸⁹

Berdasarkan analisis di atas, persamaan dan perbedaan antara klausul *general exceptions* dalam Pasal XX GATT 1994 dan klausul *security exceptions* WTO dapat disimpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

⁸⁰ WTO-DSB, *European Communities—Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products*, Appellate Body Report, WT/DS135/AB/R (12 Maret 2001), para. 172: “...the remaining question, then, is whether there is an alternative measure that would achieve the same end and that is less restrictive of trade than a prohibition”; GATT, *United States—Section 337 of the Tariff Act of 1930*, Panel Report, BISD 36S/345 (7 November 1989), para. 5.26; GATT, *United States—Measures Affecting Alcoholic and Malt Beverages*, Panel Report, DS23/R - 39S/206 (19 Juni 1992), para. 5.52; Panel Report *Thailand—Cigarettes*, para. 223.

⁸¹ WTO-DSB, *United States—Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services*, Appellate Body Report, WT/DS285/AB/R (7 April 2005), para. 308.

⁸² WTO-DSB, *Brazil—Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres*, Appellate Body Report, WT/DS332/AB/R (3 Desember 2007), para. 156: “...this result must be confirmed by comparing the measure with its possible alternatives, which may be less trade restrictive while providing an equivalent contribution to the achievement of the objective pursued”; WTO-DSB, *Korea—Measures Affecting Imports of Fresh, Chilled and Frozen Beef*, Appellate Body Report, WT/DS161/AB/R dan WT/DS169/AB/R (11 Desember 2000), para. 161–164; Appellate Body Report *US—Gambling*, para. 308.

⁸³ Appellate Body Report *Brazil—Tyres*, para. 156.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ GATT 1994, Ps. XXI(b); Perjanjian TRIPS, Ps. 73(b).

⁸⁶ Akande & Williams, “International Adjudication on National Security Issues”, hlm. 387.

⁸⁷ Hahn, “Vital Interests and the Law of GATT”, hlm. 583.

⁸⁸ Panel Report *US—Malt Beverages*, para. 5.41: “The Panel also noted the practice of the CONTRACTING PARTIES of interpreting these Article XX exceptions narrowly, placing the burden on the party invoking an exception to justify its use.”

⁸⁹ Wesley A. Cann, Jr., “Creating Standards and Accountability for the Use of the WTO Security Exceptions: Reducing the Role of Power-Based Relations and Establishing a New Balance Between Sovereignty and Multilateralism,” *Yale Journal of International Law* 26 (2001), hlm. 422; Akande & Williams, “International Adjudication on National Security Issues”, hlm. 392.

Tabel 2.1

KLAUSUL <i>GENERAL EXCEPTIONS</i> PASAL XX GATT 1994	KLAUSUL <i>SECURITY EXCEPTIONS</i> WTO
PERSAMAAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedua klausul dapat digunakan untuk mengecualikan kewajiban substantif manapun dalam masing-masing perjanjian WTO; 2. Penerapan kedua klausul tetap harus ditinjau keabsahannya oleh WTO-DSB; 	
PERBEDAAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Larangan “<i>arbitrary or unjustifiable discrimination dan disguised restriction on international trade</i>” dalam menggunakan Pasal XX GATT 1994; 2. Terbatas pada kepentingan-kepentingan ekonomi dan sosial; 3. Kepentingan-kepentingan yang dapat dijadikan alasan penggunaan klausul hanya terbatas pada apa yang tertera dalam ayat (a) – (j); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan klausul secara leluasa asal digunakan dalam situasi-situasi keamanan tertentu; 2. Terbatas pada kepentingan-kepentingan politik dan keamanan; mengecualikan alasan ekonomi; 3. Bergantung pada diskresi Anggota WTO dalam menentukan apa yang menjadi “<i>essential security interests</i>”;
<ol style="list-style-type: none"> 4. “<i>necessary</i>”; 5. Peninjauan <i>necessity</i> secara objektif; tindakan yang diambil Anggota WTO merupakan sarana terakhir dan tidak ada alternatif lain untuk melindungi kepentingan. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. “<i>it considers necessary</i>”; 5. Peninjauan <i>necessity</i> berdasarkan prinsip itikad baik; Anggota WTO memiliki diskresi untuk menentukan tindakan yang dianggap “<i>necessary</i>”, asal masih berkaitan dengan situasi atau kepentingan keamanan.

3. Klausul *Security Exceptions* WTO dan Klausul *Non-Precluded Measures* di BIT Argentina-AS, BIT India-Jerman, dan BIT India-Mauritius

Di luar perjanjian-perjanjian WTO, referensi kepada “*essential security interests*” lazim ditemukan dalam BIT dan perjanjian-perjanjian investasi multilateral.⁹⁰ *Security exceptions* dalam perjanjian-perjanjian investasi ini memiliki pengaturan yang beraneka ragam,⁹¹ namun pengecualian keamanan nasional yang paling umum terdapat dalam BIT dikenal dengan nama klausul “*non-precluded measures*” atau klausul yang menjabarkan “tindakan-tindakan yang tidak dilarang”.⁹² Bahasa yang digunakan dalam klausul *non-precluded measures* mengalami sedikit perubahan dari klausul *security exceptions* WTO, terutama terkait keberadaan frasa “*it considers*”.⁹³ Kedua jenis klausul ini seringkali dibandingkan dalam putusan-putusan arbitrase ISDS, terutama untuk menjawab permasalahan terkait standar peninjauan dan cakupan dari “*essential security interests*”.⁹⁴

⁹⁰ Yannaca-Small, “Essential Security Interests Under International Investment Law”, hlm. 94; Rudolf Dolzer dan Christoph Schreuer, *Principles of International Investment Law* (Oxford: Oxford University Press, 2012) hlm. 189–190.

⁹¹ William W. Burke-White dan Andreas von Staden, “Investment Protection in Extraordinary Times: The Interpretation and Application of Non-precluded Measures Provisions in Bilateral Investment Treaties,” *Virginia Journal of International Law* 48 (2008), hlm. 326.

⁹² William J. Moon, “Essential Security Interests in International Investment Agreements,” *Journal of International Economic Law* 15 (2012), hlm. 481.

⁹³ Blanco & Pehl, *National Security Exceptions*, hlm. 40–41.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 44; Moon, “Essential Security Interests”, hlm. 492.

a. Tinjauan Umum Klausul *Non-Precluded Measures*

Pasal XI BIT Argentina-AS merupakan klausul *non-precluded measures* yang pertama dan paling sering dipersengketakan dalam sejarah ISDS.⁹⁵ Pasal ini menyatakan sebagai berikut:

“This Treaty shall not preclude the application by either Party of measures necessary for the maintenance of public order, the fulfillment of its obligations with respect to the maintenance or restoration of international peace or security, or the protection of its own essential security interests.” (penekanan ditambahkan)⁹⁶

Pasal XI BIT Argentina-AS menjadi pokok sengketa antara investor-investor AS dengan Argentina akibat krisis ekonomi 2001, dan merupakan pertama kalinya klausul *non-precluded measures* digunakan oleh negara dalam sejarah ISDS.⁹⁷ Sengketa-sengketa Argentina ini dilatarbelakangi oleh fakta-fakta yang serupa; sejumlah investor AS mengakuisisi saham dari berbagai perusahaan yang diprivatisasi oleh Argentina pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, yang mana program privatisasi ini didukung dengan kebijakan pemerintah Argentina mematok kurs peso terhadap dolar AS dan menggunakan dolar AS dalam segala urusan perhitungan bea.⁹⁸ Menjelang krisis finansial di tahun 2001, kebijakan-kebijakan ini diberhentikan oleh Argentina secara drastis dengan dilakukannya devaluasi peso, mengkonversikan semua penggunaan dolar AS dalam perjanjian-perjanjian dan kegiatan ekonomi ke dalam peso, dan melakukan pembekuan deposito bank.⁹⁹ Masing-masing investor menggugat Argentina ke arbitrase berdasarkan BIT Argentina-AS akibat kebijakan-kebijakan Argentina yang dianggap melanggar perlindungan investor.¹⁰⁰ Argentina mencoba mempertahankan keabsahan dari kebijakannya menggunakan Pasal XI BIT Argentina-AS dengan mendalilkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut diperlukan

⁹⁵ Blanco & Pehl, *National Security Exceptions*, hlm. 41.

⁹⁶ BIT Argentina-AS, Ps. XI.

⁹⁷ Burke-White & von Staden, “Investment Protection in Extraordinary Times”, hlm. 314 & 393; Kabra, “Return of the Inconsistent Application”, hlm. 726–727; ICSID, *CMS Gas Transmission Company v Argentina*, Award, Case No. ARB/01/8 (12 Mei 2005); ICSID, *Continental Casualty Co. v Argentina*, Award, Case No. ARB/03/9 (5 September 2008); ICSID, *El Paso Energy International Co. v Argentina*, Award, Case No. ARB/03/5 (31 Oktober 2011); ICSID, *Enron Corp. and Ponderosa Assets L. P. v Argentina*, Award, Case No. ARB/01/3 (22 Mei 2007); ICSID, *LG&E Energy Corp. et al. v Argentina*, Decision on Liability, Case No. ARB/02/1 (3 Oktober 2006); ICSID, *Sempra Energy International v Argentina*, Award, Case No. ARB/02/16 (28 September 2007); ICSID, *Mobil Exploration and Development Argentina Inc. Suc. Argentina and Mobil Argentina S.A. v Argentina*, Decision on Jurisdiction and Liability, Case No. ARB/04/16 (10 April 2013); ICSID, *CMS Gas Transmission Company v Argentina*, Decision of the Ad Hoc Committee on the Application for Annulment of the Argentine Republic, Case No. ARB/01/8 (25 September 2007); ICSID, *Continental Casualty Co. v Argentina*, Decision on the Application for Partial Annulment of Continental Casualty Company and the Application for Partial Annulment of the Argentine Republic, Case No. ARB/03/9 (16 September 2011); ICSID, *El Paso Energy International Co. v Argentina*, Decision of the Ad Hoc Committee on the Application for Annulment of the Argentine Republic, Case No. ARB/03/5 (22 September 2014); ICSID, *Enron Corp. and Ponderosa Assets L. P. v Argentina*, Decision on the Application for Annulment of the Argentine Republic, Case No. ARB/01/3 (30 Juli 2010); ICSID, *Mobil Exploration and Development Argentina Inc. Suc. Argentina and Mobil Argentina S.A.*, Decisión sobre la solicitud de anulación de la República Argentina, Case No. ARB/04/16 (8 Mei 2019); ICSID, *Sempra Energy International v Argentina*, Decision on the Argentine Republic’s Application for Annulment of the Award, Case No. ARB/02/16 (20 Juni 2010).

⁹⁸ José E. Alvarez dan Kathryn Khamsi, “The Argentine Crisis and Foreign Investors: A Glimpse into the Heart of the Investment Regime,” dalam *The Yearbook on International Investment Law and Policy* 2008/2009, ed. Karl P. Sauvant (New York: Oxford University Press, 2009), hlm. 388–389.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 390–391.

(*necessary*) untuk melindungi *essential security interests*-nya selama periode krisis ekonomi yang hampir meruntuhkan keadaan sosial, politik, dan ekonomi Argentina.¹⁰¹

Selain klausul *non-precluded measures* dalam Pasal XI BIT Argentina-AS, terdapat putusan-putusan arbitrase ISDS yang membahas pengaturan serupa di BIT India-Jerman¹⁰² dan BIT India-Mauritius.¹⁰³ Pasal 12 BIT India-Jerman menyatakan:

“Nothing in this Agreement shall prevent either Contracting Party from applying prohibitions or restrictions to the extent necessary for the protection of its essential security interests, or for the prevention of diseases and pests in animals or plants.”
(penekanan ditambahkan)

Sementara Pasal 11(3) BIT India-Mauritius menyatakan:

“The provisions of this Agreement shall not in any way limit the right of either Contracting Party to apply prohibitions or restrictions of any kind or take any other action which is directed to the protection of its essential security interests, or to the protection of public health or the prevention of diseases in pests or animals or plants.” (penekanan ditambahkan)

Kendati kemiripan antara pengaturan klausul-klausul ini, majelis arbiter sering mencapai kesimpulan yang tidak konsisten terkait standar peninjauan klausul *non-precluded measures* dan cakupan dari “*essential security interests*”,¹⁰⁴ yakni dalam kasus-kasus *CC/Devas v India*¹⁰⁵ dan *Deutsche Telekom v India*¹⁰⁶. *CC/Devas* dan *Deutsche Telekom* bermula dari perjanjian sewa menyewa spektrum frekuensi radio antara India dengan perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang dibatalkan secara sepihak oleh India.¹⁰⁷ Dengan menggunakan klausul *non-precluded measures* di BIT India-Mauritius dan BIT India-Jerman, India mencoba menjustifikasi tindakannya dengan argumentasi bahwa frekuensi radio tersebut dibutuhkan untuk keperluan militer dan kebutuhan-kebutuhan pertahanan lainnya.¹⁰⁸ Kesimpulan utama yang diambil oleh majelis arbiter dalam masing-masing kasus antara lain menyangkut standar peninjauan yang berlaku ketika menganalisis unsur “*necessary*”, serta lingkup *essential security interests* dalam situasi non-militer.¹⁰⁹

b. Persamaan dan Perbedaan dengan Klausul *Security Exceptions* WTO

Terdapat dua karakteristik yang menjadi fokus perbandingan antara klausul *non-precluded measures* dengan klausul *security exceptions* WTO dalam putusan-putusan arbitrase ISDS: peninjauan klausul *non-precluded measures* secara objektif oleh majelis

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 391; Burke-White & von Staden, “Investment Protection in Extraordinary Times”, hlm. 312.

¹⁰² BIT India-Jerman, Ps. 12.

¹⁰³ BIT India-Mauritius, Ps. 11(3).

¹⁰⁴ Ridhi Kabra, “Return of the Inconsistent Application of the ‘Essential Security Interest’ Clause in Investment Treaty Arbitration: *CC/Devas v India* and *Deutsche Telekom v India*,” *ICSID Review* 34 (2019), hlm. 725.

¹⁰⁵ PCA, *CC/Devas (Mauritius) Ltd., Devas Employees Mauritius Private Ltd. and Telecom Devas Mauritius Ltd. v India*, Award on Jurisdiction and Merits, Case No. 2013-0 (25 July 2016), para. 218.

¹⁰⁶ PCA, *Deutsche Telekom AG v India*, Interim Award, Case No. 2014-10 (13 December 2017), para. 231.

¹⁰⁷ Kabra, “Return of the Inconsistent Application”, hlm. 731.

¹⁰⁸ Award on Jurisdiction and Merits *CC/Devas*, para. 143–144; Interim Award *Deutsche Telekom*, para. 89.

¹⁰⁹ Kabra, “Return of the Inconsistent Application”, hlm. 727; Alvarez & Khamsi, “The Argentine Crisis and Foreign Investors”, hlm. 386.

arbiter,¹¹⁰ dan lingkup *essential security interests* dalam klausul *non-precluded measures* yang pada umumnya tidak terbatas pada keadaan darurat perang atau situasi kegentingan politik.¹¹¹

Pertama, klausul *non-precluded measures* merupakan klausul pengecualian yang pada dasarnya harus ditafsirkan secara sempit, sehingga tanpa frasa “*it considers*”, majelis arbiter berwenang untuk meninjau klausul ini secara objektif.¹¹² Hal ini berbeda dengan klausul *security exceptions* WTO yang menggunakan frasa “*it considers*”, menegaskan hak prerogatif Anggota WTO dalam menentukan tindakan yang perlu diambil tanpa peninjauan yang terlalu dalam.¹¹³ Menimbang karakteristik BIT yang merupakan hasil perundingan bilateral, pemilihan kata dalam BIT menjadi signifikan sebab apa yang menjadi pemahaman kedua negara dapat langsung dituangkan ke dalam kesepakatan; kedua negara dapat memperluas atau mempersempit cakupan klausul *non-precluded measures* sebagaimana mereka kehendaki tanpa menimbulkan multitafsir.¹¹⁴ Terlebih lagi, BIT umumnya dibuat dengan tujuan mengutamakan perlindungan hak-hak investor asing dari dampak perubahan ekonomi dan politik yang drastic, sehingga peninjauan yang luas dan subjektif terhadap klausul *non-precluded measures* akan bertentangan dengan tujuan ini.¹¹⁵ Kendati demikian, terdapat kemiripan antara peninjauan klausul *non-precluded measures* dengan *security exceptions* WTO mengenai hak prerogatif negara dalam mengemukakan kepentingan keamanannya; negara sudah semestinya diberikan suatu kebebasan untuk memutuskan tindakan apa yang diperlukan dalam situasi keamanan tertentu, asalkan keputusan tersebut diambil berdasarkan itikad baik.¹¹⁶

Kedua, penafsiran dari *non-precluded measures* dalam putusan-putusan arbitrase ISDS berhasil membuka ruang bagi situasi-situasi non-militer untuk dikategorikan sebagai sebuah *essential security interests*.¹¹⁷ Di kasus-kasus Argentina, majelis arbiter dihadapkan pada situasi ketika ekonomi negara berada dalam ambang kehancuran.¹¹⁸ Di kasus-kasus India, terdapat situasi yang sedikit berbeda; walaupun India tidak sedang dilanda krisis namun terdapat sumber daya yang hendak digunakan untuk kebutuhan militer dan sedang berada dalam ambang keterbatasan.¹¹⁹ Berangkat dari putusan-putusan arbitrase ISDS ini, patut digarisbawahi bahwa perluasan konsep *essential security interests* dalam *non-precluded measures* untuk mencakup situasi-situasi ekonomi atau eksploitasi sumber daya tidak dapat dengan mudah diterjemahkan ke dalam penafsiran klausul *security exceptions* WTO. Hal ini dikarenakan BIT jarang memuat klausul spesifik terkait *general exceptions* seperti yang terdapat pada Pasal XX GATT 1994, yakni klausul yang secara khusus

¹¹⁰ Award *CMS*, para. 373; Decision on Liability, *LG&E*, para. 212; Award *Enron*, para. 332; Award *Sempra*, para. 385; Award *Continental Casualty*, para. 187.

¹¹¹ Award *CMS*, para. 359; Decision on Liability, *LG&E*, para. 238; Award *Enron*, para. 332; Award *Sempra*, para. 374; Award *Continental Casualty*, para. 178.

¹¹² Ulf Linderfalk, *On the Interpretation of Treaties: the Modern International Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties* (Dordrecht: Springer, 2007), hlm. 286.

¹¹³ Award *Enron*, para. 335–336; Award *Sempra*, para. 379.

¹¹⁴ Decision on Jurisdiction and Liability *Mobil*, para. 1037; Oliver Dörr, “Article 31: General Rule of Interpretation,” dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary*, ed. 2, eds. Oliver Dörr dan Kirsten Schmalenbach (Berlin: Springer, 2018), hlm. 579–580.

¹¹⁵ Award *Enron*, para. 331–332; Award *El Paso*, para. 600; Decision on Jurisdiction and Liability *Mobil*, para. 1049.

¹¹⁶ Award *Continental Casualty*, para. 281; Decision on Liability *LG&E*, para. 214; Panel Report *Russia—Traffic in Transit*, para. 7.132.

¹¹⁷ Alvarez & Khamsi, “The Argentine Crisis and Foreign Investors”, hlm. 451–5; Andrew Newcombe dan Lluís Paradell, *Law and Practice of Investment Treaties* (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009), hlm. 497–498.

¹¹⁸ Kabra, “Return of the Inconsistent Application”, hlm. 736.

¹¹⁹ *Ibid.*

membahas pengecualian-pengecualian untuk alasan ekonomi dan bersifat non-militer.¹²⁰ Tidak adanya pembagian secara spesifik dalam BIT dapat mempengaruhi penafsiran *essential security interests* dalam klausul *non-precluded measures* menjadi lebih luas dibanding dalam *security exceptions* WTO yang pada praktiknya mengecualikan alasan-alasan ekonomi dan perlindungan sumber daya.¹²¹ Selain itu, *security exceptions* WTO secara eksplisit memuat situasi-situasi keamanan internasional yang mana pengecualian ini dapat digunakan, sementara klausul *non-precluded measures* jarang memuat kriteria demikian.¹²² Hal-hal ini mengakibatkan adanya perbedaan yang mendasar antara klausul *non-precluded measures* di BIT dengan *security exceptions* WTO terkait cakupan *essential security interests*.

Berdasarkan analisis di atas, persamaan dan perbedaan antara klausul *non-precluded measures* di BIT Argentina-AS, BIT India-Jerman, dan BIT India-Mauritius dengan klausul *security exceptions* WTO dapat disimpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

KLAUSUL <i>NON-PRECLUDED MEASURES</i> PASAL XI BIT ARGENTINA-AS, PASAL 12 BIT INDIA-JERMAN, DAN PASAL 11(3) BIT INDIA-MAURITIUS	KLAUSUL <i>SECURITY EXCEPTIONS</i> WTO
PERSAMAAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedua jenis klausul dapat digunakan untuk mengecualikan kewajiban substantif manapun dalam masing-masing perjanjian (kewajiban WTO dan kewajiban BIT); 2. Penerapan kedua klausul tetap harus ditinjau keabsahannya oleh WTO-DSB; 3. Masing-masing negara memiliki diskresi dalam menentukan apa yang menjadi “<i>essential security interests</i>”; 4. Kedua jenis klausul harus ditinjau berdasarkan standar itikad baik untuk membatasi diskresi negara yang hendak menggunakan pengecualian keamanan. 	
PERBEDAAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. “<i>necessary</i>”; 2. Peninjauan <i>necessity</i> secara objektif (dan berdasarkan standar itikad baik); tindakan yang diambil negara merupakan sarana terakhir dan tidak ada alternatif lain untuk melindungi kepentingan keamanan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. “<i>it considers necessary</i>”; 2. Peninjauan <i>necessity</i> berdasarkan prinsip itikad baik; Anggota WTO memiliki diskresi yang luas untuk menentukan tindakan yang dianggap “<i>necessary</i>”, asal masih berkaitan dengan situasi atau kepentingan keamanan;

¹²⁰ Moon, “Essential Security Interests”, hlm. 492.

¹²¹ Schloemann & Ohlhoff, “‘Constitutionalization’ and Dispute Settlement in the WTO”, hlm. 445; Hahn, “Vital Interests and the Law of GATT”, hlm. 580–581.

¹²² Kabra, “Return of the Inconsistent Application”, hlm. 735–736; Panel Report *Russia—Traffic in Transit*, para. 7.134.

<ol style="list-style-type: none"> 3. “<i>essential security interests</i>” juga dapat mencakup ancaman-ancaman di luar perang, seperti krisis ekonomi dan instabilitas sosial; 4. “<i>essential security interests</i>” juga mencakup ancaman keamanan yang akan datang; 5. Tidak mensyaratkan adanya perang atau kegentingan yang sedang berlangsung. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Terbatas pada kepentingan-kepentingan politik dan keamanan; mengecualikan alasan ekonomi; 4. “<i>essential security interests</i>” harus berkaitan dengan salah satu dari tiga situasi keamanan yang tercantum dalam klausul <i>security exceptions</i> WTO: <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga dan bahan-bahan nuklir; b. Perdagangan senjata dan persediaan militer; c. Berlangsungnya perang atau kegentingan dalam hubungan internasional; 5. Hanya berlaku terhadap ancaman keamanan yang telah termaterialisasi.
--	---

4. Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Penggunaan Klausul *Security Exceptions* Untuk Mengesampingkan Kewajiban Dalam Perjanjian TRIPS

Pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah-pemerintah di seluruh dunia untuk mempertimbangkan langkah-langkah pengesampingan paten dan HKI lainnya demi memfasilitasi produksi dan pendistribusian vaksin, perawatan, diagnosa dan alat-alat kesehatan.¹²³ Perjanjian TRIPS menetapkan standar minimum tertentu mengenai perlindungan HKI yang wajib dipertahankan oleh Anggota WTO termasuk prosedur penegakan yang tersedia bagi pemegang-pemegang HKI, sehingga berpotensi menghambat penanganan Covid-19.¹²⁴

Mengikuti kerangka analisis WTO-DSB di *Russia—Traffic in Transit* dan *Saudi Arabia—Protection of IPR*,¹²⁵ bab ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama membahas alasan-alasan yang menjadikan pandemi Covid-19 sebuah “*emergency in international relations*” yang merupakan salah satu syarat penggunaan klausul *security exceptions* di Pasal 73(b) Perjanjian TRIPS. Bagian kedua membahas tindakan-tindakan yang dapat diambil Anggota WTO dalam pandemi Covid-19 untuk melindungi “*essential security interests*”, dan bagaimana tindakan-tindakan tersebut bersesuaian dengan standar itikad baik.

a. Pandemi Covid-19 Sebagai Sebuah “*emergency in international relations*”

Panel WTO dalam kasus *Russia—Traffic in Transit* menafsirkan sebuah “*emergency in international relations*” sebagai suatu peristiwa dengan skala yang setara dengan konflik

¹²³ World Trade Organization, *Waiver from Certain Provisions of the TRIPS Agreement for the Prevention, Containment and Treatment of Covid-19: Communication from India and South Africa*, <<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True>>, diakses tanggal 24 Desember 2021; World Health Organization, *WHO Director-General Commends United States Decision to Support Temporary Waiver on Intellectual Property Rights for Covid-19 Vaccines*, <<https://www.who.int/news/item/05-05-2021-who-director-general-commends-united-states-decision-to-support-temporary-waiver-on-intellectual-property-rights-for-covid-19-vaccines>>, diakses tanggal 24 Desember 2021.

¹²⁴ The Economist, *Mariana Mazzucato, Jayati Ghosh and Els Torrele on waiving covid patents*, <<https://www.economist.com/by-invitation/2021/04/20/mariana-mazzucato-jayati-ghosh-and-els-torrele-on-waiving-covid-patents>>, diakses tanggal 24 Desember 2021.

¹²⁵ Panel Report *Saudi Arabia—Protection of IPR*, para. 7.242–7.243.

bersenjata, suatu ketegangan atau krisis tingkat tinggi, dan ketidakstabilan umum yang melanda suatu negara secara menyeluruh.¹²⁶ Faktor-faktor krusial mengenai keberadaan sebuah “*emergency in international relations*” meliputi reaksi umum masyarakat internasional dan Dewan Keamanan PBB, penurunan tajam kegiatan ekonomi dan perdagangan antarnegara, serta kerusuhan secara menyeluruh di berbagai negara.¹²⁷ Pandemi Covid-19 dapat memenuhi syarat sebagai sebuah *emergency in international relations*, melihat skala penyebaran yang melebihi kapasitas medis berbagai negara, hambatan yang diciptakan terhadap penyelesaian konflik bersenjata, serta mempertimbangkan penafsiran teks-teks WTO yang relevan.

i. Kategorisasi Pandemi Covid-19 Sebagai *Public Health Emergency of International Concern* oleh WHO

Indikator pertama bahwa pandemi Covid-19 merupakan sebuah *emergency in international relations* dapat dilihat dari pernyataan Direktur Jenderal WHO pada 30 Januari 2020 yang menyatakan bahwa wabah penyakit Covid-19 merupakan sebuah *Public Health Emergency of International Concern* (“PHEIC”).¹²⁸ PHEIC menandakan sebuah kegentingan dalam hubungan internasional terkait pencegahan penyebaran virus atau patogen lainnya, saat skala penyebaran suatu wabah penyakit yang besar telah dianggap menimbulkan kekacauan bagi arus lalu lintas manusia dan perdagangan di berbagai belahan dunia, sehingga membutuhkan respon dengan skala internasional.¹²⁹

Permasalahan utama dari dinyatakannya sebuah PHEIC adalah mengenai alokasi obat-obatan (termasuk vaksin) dan peralatan medis antara negara-negara yang terkena dampak pandemi ini. Sejak Juli 2020, keterbatasan kapasitas produksi menyebabkan negara-negara berpenghasilan tinggi atau *high-income countries* berkesempatan lebih dahulu untuk mendapatkan akses terhadap obat-obatan dan vaksin Covid-19, karena negara-negara ini mampu mensubsidi atau membeli langsung dari produsen.¹³⁰ Produsen-produsen vaksin ditekan untuk mengutamakan suplai bagi negara-negara maju, seperti kasus gugatan terhadap AstraZeneca oleh negara-negara Uni Eropa yang diputuskan di pengadilan Belgia pada bulan Juni 2021.¹³¹ Di lain sisi, negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah menghadapi risiko tidak tersedianya vaksin dan peralatan medis yang cukup dan tepat waktu

¹²⁶ Panel Report *Russia—Traffic in Transit*, para. 7.76.

¹²⁷ *Ibid.*, para. 7.122.

¹²⁸ World Health Organization, *WHO Director-General's statement on IHR Emergency Committee on Novel Coronavirus (2019-nCoV)*, <[https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-statement-on-ihr-emergency-committee-on-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-statement-on-ihr-emergency-committee-on-novel-coronavirus-(2019-ncov))> diakses tanggal 24 Desember 2021: “*Our greatest concern is the potential for the virus to spread to countries with weaker health systems, and which are ill-prepared to deal with it.*”

¹²⁹ World Health Organization, *Emergencies: International Health Regulations and Emergency Committees*, <<https://www.who.int/news-room/q-a-detail/emergencies-international-health-regulations-and-emergency-committees>>, diakses tanggal 24 Desember 2021.

¹³⁰ Helen Branswell, *As Coronavirus Pandemic Worsens, Health Officials Fear Nationalization of Drugs and Supplies*, <<https://www.statnews.com/2020/03/15/as-coronavirus-pandemic-worsens-health-officials-fear-nationalization-of-drugs-and-supplies/>>, diakses tanggal 24 Desember 2021; Leila Abboud, Michael Peel dan Hannah Kuchler, *Macron Summons Sanofi Chief for Claim US Has “Right To” First Covid-19 Jab*, <<https://www.ft.com/content/60434224-a70d-4a8d-821f-6ac239b4a349>>, diakses tanggal 24 Desember 2021.

¹³¹ European Commission, *Belgian Court Orders AstraZeneca to Deliver Vaccine Doses to the EU*, <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3107>, diakses tanggal 24 Desember 2021: “*Because of those breaches, AstraZeneca was ordered today by the Court of First Instance of Brussels to deliver to the EU and its Member States 50 million doses in three installments until September 27th with a 10 Euro penalty for each dose not delivered in due time.*”

untuk menangani penyebaran Covid-19 di wilayah mereka masing-masing.¹³² Pada waktu penulisan, 57% dari populasi dunia telah setidaknya telah menerima satu dosis vaksin, namun statistik menunjukkan bahwa hanya 8.1% dari populasi negara-negara berpenghasilan rendah yang telah menerima vaksinasi.¹³³ Permasalahan terkait akses terhadap obat-obatan dan peralatan medis ini melanda seluruh dunia dan merupakan salah satu fakta objektif akan adanya *emergency in international relations*.

ii. Kategorisasi Pandemi Covid-19 Sebagai *Threat to International Peace and Security* oleh PBB

Selain skala penyebarannya yang sangat besar dan menghambat akses terhadap pengobatan di seluruh dunia, Covid-19 juga telah mendapat perhatian Sekretaris Jenderal PBB serta Dewan Keamanan PBB karena berpotensi mempersulit penyelesaian konflik-konflik bersenjata serta membuka peluang bagi organisasi-organisasi terorisme untuk terus berekspansi.¹³⁴ Pada 1 Juli 2020 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 2532 (2020) yang pada intinya menetapkan situasi pandemi Covid-19 sebagai sebuah ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia ("*threat to international peace and security*") serta menghimbau negara-negara untuk menghentikan konflik bersenjata dan mempercepat respon humaniter untuk mencegah penyebaran Covid-19.¹³⁵ Hal ini menunjukkan bagaimana pandemi Covid-19 bukan hanya merupakan isu kesehatan namun juga memiliki kaitan yang sangat erat dengan situasi keamanan dan konflik bersenjata.

Respon Dewan Keamanan PBB terhadap pandemi Covid-19 ini memiliki kemiripan dengan wabah penyakit Ebola di Afrika Barat pada tahun 2014 yang juga ditetapkan sebagai sebuah ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2177 (2014), walaupun memiliki skala yang lebih kecil dibanding Covid-19.¹³⁶ Faktor serupa yang mendorong kedua resolusi di atas antara lain adalah bagaimana pandemi Covid-19 dan wabah penyakit Ebola memperparah situasi konflik bersenjata yang sedang berlangsung dan menghambat proses pembangunan perdamaian negara-negara bekas konflik.¹³⁷

iii. Kategorisasi Pandemi Covid-19 Sebagai *International Emergency Berdasarkan Penafsiran Deklarasi Doha*

Selain fakta-fakta objektif terkait persebaran dan dampak dari pandemi Covid-19, penggolongan pandemi ini sebagai sebuah *emergency in international relations* yang memicu penggunaan Pasal 73(b) Perjanjian TRIPS juga didukung dengan penafsiran teks-

¹³² Benjamin Muller, *Vaccines Bring Rich Nations Back to Life as Covid Ravages Poorer Countries*, <<https://www.nytimes.com/2021/05/05/world/europe/coronavirus-covax-vaccination.html>>, diakses tanggal 24 Desember 2021.

¹³³ Our World in Data, *Coronavirus (COVID-19) Vaccinations - Statistics and Research*, <<https://ourworldindata.org/covid-vaccinations>>, diakses tanggal 24 Desember 2021: "57% of the world population has received at least one dose of a COVID-19 vaccine. 8.85 billion doses have been administered globally, and 34.51 million are now administered each day. Only 8.1% of people in low-income countries have received at least one dose."

¹³⁴ United Nations Secretary-General, *Secretary-General's remarks to the Security Council on the COVID-19 Pandemic [as delivered]*, <<https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-04-09/secretary-generals-remarks-the-security-council-the-covid-19-pandemic-delivered>>, diakses tanggal 24 Desember 2021.

¹³⁵ Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolution 2532 (2020), 1 Juli 2020, S/RES/2532: "...Considering that the unprecedented extent of the COVID-19 pandemic is likely to endanger the maintenance of international peace and security..."

¹³⁶ Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolution 2177 (2014), 18 September 2014, S/RES/2177: "...Determining that the unprecedented extent of the Ebola outbreak in Africa constitutes a threat to international peace and security..."

¹³⁷ *Ibid.*

teks WTO terkait, khususnya Deklarasi Doha. Pada paragraph 5(c) Deklarasi Doha, terdapat beberapa peristiwa yang dikategorikan sebagai sebuah “*national emergency*” dan salah satunya adalah sebuah epidemi.¹³⁸ Epidemi merupakan terjadinya wabah secara serempak dan signifikan di berbagai daerah dalam suatu wilayah geografis tertentu.¹³⁹ Sementara pandemi merupakan kejadian yang melibatkan penyebaran penyakit dengan angka berkali-kali lipat tiap harinya dan meluas ke berbagai negara, sehingga berada pada skala yang jauh lebih besar dibanding sebuah epidemi.¹⁴⁰

Panel WTO di kasus *Australia—Plain Packaging* mempertimbangkan paragraf 5 dari Deklarasi Doha sebagai sebuah kesepakatan seluruh Anggota WTO mengenai penafsiran resmi dari Perjanjian TRIPS, sehingga penafsiran ini bersifat mengikat.¹⁴¹ Dengan demikian, paragraph 5(c) dari Deklarasi Doha yang menyepakati bahwa sebuah epidemi dapat digolongkan sebagai “*national emergency*” membuka ruang bagi pandemi untuk dikategorikan sebagai sebuah “*international emergency*”, mengingat skalanya yang lebih besar dan bersifat internasional.¹⁴²

Sebagai kesimpulan, dengan dinyatakannya wabah penyakit Covid-19 sebagai sebuah pandemi dan disertai dengan ketidakstabilan ekonomi, sosial dan politik secara umum di seluruh dunia,¹⁴³ pandemi Covid-19 tergolong sebagai sebuah *emergency in international relations*. Dengan demikian, Pasal 73(b) Perjanjian TRIPS berlaku untuk tindakan-tindakan yang diambil Anggota WTO demi melindungi *essential security interests*-nya dari bahaya pandemi Covid-19, dengan syarat bahwa tindakan-tindakan tersebut memenuhi syarat itikad baik.

b. Tindakan yang Dapat Diambil Anggota WTO dalam Pandemi Covid-19 untuk Melindungi “*essential security interests*”

Dengan dipenuhinya persyaratan sebuah *emergency in international relations*, tahap selanjutnya bagi Anggota WTO untuk memanfaatkan Pasal 73(b) Perjanjian TRIPS adalah menjelaskan bagaimana tindakan keamanannya diambil dalam periode ketika *emergency in international relations* ini masih berlangsung, serta mengemukakan kepentingan keamanan yang hendak dilindungi secara terang dan jelas.¹⁴⁴ Dengan adanya frasa “*it considers*” di Pasal 73(b) Perjanjian TRIPS, WTO-DSB hanya memiliki kewenangan yang terbatas untuk meninjau diskresi Anggota WTO dalam menentukan tindakan yang dapat diambil tersebut, terutama menggunakan standar itikad baik sebagai tolak ukur; bahwa harus terdapat hubungan yang nyata antara tindakan yang diambil dengan kepentingan keamanan dalam situasi *emergency in international relations*.¹⁴⁵

¹³⁸ WTO Ministerial Conference, *Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, Fourth Session, Doha, 9–14 November 2001*, WT/MIN(01)/DEC/2 (2001), para. 5(c): “Each member has the right to determine what constitutes a national emergency or other circumstances of extreme urgency, it being understood that public health crises, including those relating to HIV/AIDS, tuberculosis, malaria and other epidemics, can represent a national emergency or other circumstances of extreme urgency.”

¹³⁹ Columbia Public Health, *Epidemic, Endemic, Pandemic: What are the Differences?*, <<https://www.publichealth.columbia.edu/public-health-now/news/epidemic-endemic-pandemic-what-are-differences>>, diakses tanggal 24 Desember 2021.

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ WTO-DSB, *Australia—Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging*, Panel Report, WT/DS435/R; WT/DS441/R; WT/DS458/R; WT/DS467/R (28 Juni 2018), para. 7.2408 – 7.2409.

¹⁴² Correa, *TRIPS Commentary*, hlm. 490.

¹⁴³ World Health Organization, *WHO Director-General's Opening Remarks at the Media Briefing on COVID-19 - 11 March 2020*, <<https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>>, diakses tanggal 24 Desember 2021.

¹⁴⁴ Panel Report *Russia—Traffic in Transit*, para. 7.242.

¹⁴⁵ *Ibid.*

Terkait persyaratan bahwa tindakan Anggota WTO diambil dalam periode selama *emergency in international relations* berlangsung, kriteria ini tidak perlu dibahas secara mendalam karena fakta mengenai kapan pandemi Covid-19 akan berakhir belum tersedia pada saat penulisan; selama Covid-19 masih berstatus pandemi atau selama ketidakstabilan masih berlangsung setelah pandemi ini berakhir, tindakan-tindakan yang diambil Anggota WTO dalam jangka waktu tersebut otomatis memenuhi kriteria ini.¹⁴⁶ Permasalahan utama yang dibahas lebih lanjut adalah bagaimana Anggota WTO mengemukakan *essential security interests* yang hendak dilindungi dan bagaimanakah batasan terhadap diskresi Anggota WTO dalam mengesampingkan perjanjian TRIPS ketika menggunakan klausul *security exceptions*.

i. Mengemukakan *Essential Security Interests* yang Hendak Dilindungi

Berdasarkan analisis Panel WTO di *Russia—Traffic in Transit*, apa saja *essential security interests* yang hendak dilindungi Anggota WTO melalui klausul *security exceptions* harus dapat diartikulasikan secara jelas, terutama bagaimana kepentingan tersebut berhubungan dengan sebuah *emergency in international relations*.¹⁴⁷ Secara umum yang dapat masuk ke dalam kategori *essential security interests* adalah perlindungan teritori dan warga negara dari ancaman eksternal serta pemeliharaan hukum dan ketertiban umum secara internal.¹⁴⁸ Namun bagaimana ancaman tersebut dimanifestasikan secara konkret dalam masing-masing peristiwa merupakan hak masing-masing Anggota WTO untuk menentukan,¹⁴⁹ dengan syarat bahwa Anggota WTO beritikad baik untuk tidak semata-mata menyelubungkan kepentingan komersil dengan kedok kepentingan keamanan.¹⁵⁰

Dalam konteks pandemi Covid-19, *essential security interests* yang dapat dikemukakan secara jelas oleh Anggota WTO adalah perlindungan kesehatan masyarakat dari dampak mematikan Covid-19. Di akhir abad ke-20, akibat dampak buruk HIV/AIDS yang dirasakan di berbagai negara serta ancaman-ancaman terkait senjata biologis untuk tujuan perang, pengertian kepentingan keamanan mulai meluas untuk mencakup kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit menular sehingga memicu negara-negara untuk memperbarui kebijakan dalam dan luar negeri untuk menangani hal-hal tersebut.¹⁵¹ Dalam skala yang jauh lebih besar dibanding pandemi-pandemi sebelumnya, tiada keraguan bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan kekacauan bagi ketertiban umum di berbagai negara karena sulitnya pemerintah menekan angka penularannya atau mendapat akses pengobatan.¹⁵²

Apabila ancaman Covid-19 ditinjau secara sempit dari perspektif kapasitas pertahanan negara melawan ancaman eksternal, ancaman masuknya Covid-19 dari luar negeri merupakan permasalahan yang berkaitan dengan *essential security interests* melihat tingginya angka penyebaran dan kematian yang disebabkan oleh penyakit ini.¹⁵³ Melihat praktik AS yang berdasarkan *Defense Production Act of 1950* menggunakan alasan

¹⁴⁶ Frederick Abbott, "The TRIPS Agreement Article 73 Security Exceptions and the COVID-19 Pandemic," Global South Research Paper No. 116 (2020), hlm. 9.

¹⁴⁷ Panel Report *Russia—Traffic in Transit*, para. 7.130–7.133.

¹⁴⁸ *Ibid.*, para. 7.130.

¹⁴⁹ *Ibid.*, para. 7.131.

¹⁵⁰ *Ibid.*, para. 7.132–7.133.

¹⁵¹ David P. Fidler, "Public Health and National Security in the Global Age: Infectious Diseases, Bioterrorism, and Realpolitik," *The George Washington International Law Review* 35 (2003), hlm. 791–796.

¹⁵² Abbott, "Article 73 Security Exceptions", hlm. 10.

¹⁵³ World Health Organization, *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 2 July 2021*, <<https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-2-july-2021>>, diakses tanggal 24 Desember 2021.

keamanan nasional untuk meningkatkan produksi vaksin Covid-19 secara drastis melalui *Operation Warp Speed*,¹⁵⁴ tidak dapat dipungkiri bahwa kepentingan untuk mengakhiri pandemi Covid-19 dan penyebarannya di masing-masing wilayah Anggota WTO merupakan *essential security interests*.

ii. Kewajiban Dalam Perjanjian TRIPS Yang Wajar Untuk Dikesampingkan Selama Pandemi Covid-19

Kriteria selanjutnya yang harus dipenuhi untuk menggunakan klausul *security exceptions* dalam situasi pandemi Covid-19 adalah menunjukkan bahwa pengesampingan kewajiban dalam Perjanjian TRIPS oleh Anggota WTO adalah wajar dan dapat dikatakan *necessary*, karena masih diambil dalam konteks atau berkaitan dengan *emergency in international relations* yang dimaksud.¹⁵⁵ Mengingat frasa “*it considers necessary*” di Pasal 73(b) Perjanjian TRIPS telah memberi diskresi bagi Anggota WTO untuk menentukan apa yang dianggap *necessary*, Panel WTO di *Russia—Traffic in Transit* menetapkan bahwa kebebasan ini harus berada dalam batas wajar sesuai dengan standar itikad baik.¹⁵⁶

Sebagaimana berbeda dari peninjauan Pasal XX GATT 1994 maupun klausul *non-precluded measures* di berbagai BIT yang tidak memuat frasa “*it considers necessary*”, diskresi Anggota WTO dalam mengambil tindakan yang dianggap *necessary* jauh lebih luas ketika menggunakan klausul *security exceptions*.¹⁵⁷ Anggota WTO tidak diwajibkan untuk membuktikan bahwa tindakannya merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan WTO-DSB tidak akan mewajibkan Anggota WTO untuk mempertimbangkan alternatif lain yang dapat memitigasi dampak buruk terhadap perdagangan,¹⁵⁸ asalkan tindakan Anggota WTO tersebut masih berkaitan dengan sebuah *emergency in international relations* yang sedang dialaminya.¹⁵⁹

Dalam situasi pandemi Covid-19, terdapat berbagai macam tindakan yang dapat berkaitan dengan HKI dan dapat bersinggungan dengan kewajiban dalam Perjanjian TRIPS. Ketika Anggota WTO mengambil tindakan untuk mempermudah akses bagi pengobatan Covid-19, tidak ada masalah yang signifikan apabila tindakan tersebut mengesampingkan kewajiban dalam Perjanjian TRIPS sebab ada kaitan yang jelas dengan *emergency in international relations*.¹⁶⁰ Tindakan yang paling mungkin diambil dalam konteks ini adalah pengesampingan hak paten dan hak eksklusif pemasaran yang dipegang oleh pelaku usaha asing demi mempermudah Anggota WTO dalam memproduksi dan mendistribusikan obat-obatan Covid-19 di dalam negeri.¹⁶¹ Anggota WTO juga dapat mengambilalih hak untuk menggunakan teknologi pengobatan yang biasanya dilindungi hak paten demi kepentingan penelitian dan produksi obat-obatan Covid-19 di dalam negeri; pengesampingan HKI tersebut jelas berkaitan dengan kepentingan keamanan dan memenuhi kriteria penggunaan klausul *security exceptions*.¹⁶²

Selain hak paten dan hak eksklusif pemasaran, terdapat beberapa HKI yang dapat mempengaruhi kemampuan produsen untuk membuka akses bagi vaksin, pengobatan, dan bahan-bahan penelitian terkait Covid-19 untuk dipasarkan dan dieksploitasi demi

¹⁵⁴ United States Department of Defense, *Coronavirus: Operation Warp Speed*, <<https://www.defense.gov/Explore/Spotlight/Coronavirus/Operation-Warp-Speed/>>, diakses tanggal 24 Desember 2021.

¹⁵⁵ Panel Report *Russia—Traffic in Transit*, para. 7.146.

¹⁵⁶ *Ibid.*, para. 7.138.

¹⁵⁷ *Ibid.*, para. 7.146.

¹⁵⁸ Appellate Body Report, *EC—Asbestos*, para. 169—72.

¹⁵⁹ Panel Report *Russia—Traffic in Transit*, para. 7.138.

¹⁶⁰ Abbott, “Article 73 Security Exceptions”, hlm. 13.

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 13—14.

kepentingan umum. Sebagai contoh, pemegang hak merek dapat mencoba untuk mencegah distribusi obat-obatan yang memiliki warna atau bentuk yang mirip dengan obat-obatan yang mereka telah pasarkan sebelumnya.¹⁶³ Beberapa pihak juga dapat mengacu pada hak cipta untuk mencegah sirkulasi masal terkait pamflet informasi, infografis, dan publikasi lainnya yang diakses oleh dokter dan pasien,¹⁶⁴ atau mengacu pada hak atas desain industri untuk mencoba membatasi pengiriman peralatan-peralatan seperti tabung, jarum suntik, cawan petri untuk kebutuhan penanganan Covid-19.¹⁶⁵ Selain itu, pemegang rahasia dagang juga dapat mencoba membatasi pemanfaatan informasi-informasi krusial terkait proses pembuatan produk obat-obatan Covid-19, data uji klinis, atau rahasia dagang lainnya.¹⁶⁶ HKI yang telah disebutkan di atas dilindungi oleh berbagai macam peraturan dalam Perjanjian TRIPS,¹⁶⁷ yang tidak hanya mengatur perlindungan secara substantif namun juga memuat beberapa kewajiban terkait penegakannya.¹⁶⁸

Pengesampingan HKI secara terbatas dan untuk sementara waktu dapat menjadi bagian dari strategi Anggota WTO dalam menangani Covid-19 serta meningkatkan akses terhadap obat-obatan di masa pandemi. Tujuan tersebut jelas berkaitan dengan *essential security interests*. Namun tidak semua pengesampingan HKI di masa pandemi dapat memenuhi kriteria ini, terutama apabila tindakan yang diambil Anggota WTO tidak memiliki kaitan dengan situasi keamanan melainkan lebih bernuansa komersil.¹⁶⁹ Perumpamaan ekstrim mengenai hal ini adalah ketika Anggota WTO menghentikan perlindungan hak cipta terkait siaran asing dan layanan *online streaming* berbayar selama pandemi Covid-19, dengan alasan bahwa banyak penduduk yang sangat membutuhkan akses terhadap layanan tersebut namun mungkin tidak mampu membayar dalam situasi *lockdown* atau pembatasan kegiatan.¹⁷⁰ Walaupun Anggota WTO berhak mendefinisikan apa yang dianggap sebagai *essential security interests*, tindakan yang berbau komersil atau memiliki tujuan proteksionisme tidak wajar untuk dikaitkan dengan kepentingan keamanan sehingga tidak memenuhi kriteria untuk memanfaatkan klausul *security exceptions*.¹⁷¹

III. Kesimpulan

Pengaturan *security exceptions* WTO memiliki persamaan dan perbedaan dengan *general exceptions* di Pasal XX GATT 1994 dan *non-precluded measures* di BIT Argentina-AS, BIT India-Jerman, dan BIT India-Mauritius.

Persamaan pertama terletak pada karakteristik klausul-klausul ini yang sama-sama dapat digunakan untuk mengecualikan kewajiban substantif manapun dalam masing-masing perjanjian. **Persamaan kedua** adalah bahwa klausul-klausul ini juga tetap tunduk pada kewenangan lembaga penyelesaian sengketa yang akan meninjau keabsahan tindakan negara yang bersangkutan. Dalam meninjau tindakan negara tersebut, lembaga penyelesaian

¹⁶³ Arul George Scaria dan Kavya Mammen, “Non-Traditional Trademarks in the Pharmaceutical Sector: Non-Traditional Barriers to Access to Medicine?” dalam *The Protection of Non-traditional Marks: Critical Perspectives*, eds. Irene Calboli dan M.R.F. Senftleben (Oxford: Oxford University Press, 2018), hlm. 280–285.

¹⁶⁴ EIFL, *COVID and Copyright: The Right to Research*, <<https://www.eifl.net/blogs/covid-and-copyright-right-research>>, diakses tanggal 24 Desember 2021.

¹⁶⁵ Washington Post, *Preserving Intellectual Property Barriers to COVID-19 Vaccines Is Morally Wrong and Foolish*, <<https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/04/26/preserving-intellectual-property-barriers-covid-19-vaccines-is-morally-wrong-foolish/>>, diakses tanggal 24 Desember 2021.

¹⁶⁶ David S. Levine, *COVID-19 Trade Secrets and Information Access: An Overview*, <<http://infojustice.org/archives/42493>>, diakses tanggal 24 Desember 2021.

¹⁶⁷ Perjanjian TRIPS, Ps. 9, 16, 26, 28, 39.

¹⁶⁸ *Ibid.*, Ps. 41–61.

¹⁶⁹ Panel Report *Russia—Traffic in Transit*, para. 7.138.

¹⁷⁰ Abbott, “Article 73 Security Exceptions”, hlm. 14.

¹⁷¹ Panel Report *Saudi Arabia—Protection of IPR*, para. 7.293.

sengketa dapat meninjau berdasarkan standar itikad baik untuk menentukan apakah tindakan negara memang tidak memiliki motif tersembunyi.

Perbedaan pertama terletak pada kepentingan-kepentingan yang dilindungi; kepentingan-kepentingan yang dilindungi dalam *general exceptions* hanya menyangkut permasalahan ekonomi dan sosial sebatas yang tertera dalam ayat (a) – (j) di Pasal XX GATT 1994. Kepentingan-kepentingan yang dilindungi dalam klausul *non-precluded measures* di beberapa BIT di atas meliputi tindakan keamanan yang dapat mencakup krisis ekonomi serta situasi keamanan yang masih akan datang. Hal-hal ini berbeda dengan *security exceptions* WTO yang tidak dapat digunakan untuk melindungi kepentingan ekonomi, melainkan hanya terbatas pada kepentingan-kepentingan politik dan keamanan yang sudah termaterialisasi dalam situasi perang, kepentingan dalam hubungan internasional, perdagangan senjata dan persediaan militer, atau terkait bahan-bahan nuklir. **Perbedaan kedua** adalah mengenai keberadaan unsur “*necessary*” dan unsur “*it considers necessary*”; klausul *general exceptions* dan *non-precluded measures* mensyaratkan peninjauan secara lebih objektif dan saksama oleh lembaga penyelesaian sengketa terhadap tindakan yang diambil negara oleh karena digunakannya unsur “*necessary*”. Berbeda dengan penerapan Pasal XX GATT 1994 dan klausul *non-precluded measures* di BIT, tidak ada kewajiban bagi Anggota WTO untuk menunjukkan bahwa tindakannya merupakan satu-satunya jalan atau sarana terakhir untuk melindungi kepentingan keamanannya. Alasan perbedaan ini adalah karena pengaturan *security exceptions* WTO yang menggunakan frasa “*it considers necessary*” sehingga memberi diskresi yang lebih besar bagi Anggota WTO dalam mengambil tindakan keamanan dibanding klausul *general exceptions* dan *non-precluded measures* yang tidak memiliki pengaturan serupa. Secara keseluruhan, klausul *security exceptions* WTO merupakan pengecualian yang paling fleksibel untuk digunakan ketika negara sedang menghadapi sebuah “*emergency in international relations*”.

Pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban dalam Perjanjian TRIPS melalui klausul *security exceptions* di Pasal 73(b) Perjanjian TRIPS, setidaknya karena dua alasan. **Pertama**, pandemi Covid-19 dapat digolongkan sebagai sebuah “*emergency in international relations*” melihat ketidakstabilan ekonomi, sosial dan politik secara umum yang diakibatkannya. **Kedua**, peningkatan akses bagi obat-obatan dan vaksin Covid-19 sangat berkaitan dengan kepentingan keamanan, dan banyak HKI yang dilindungi dalam Perjanjian TRIPS dapat dikesampingkan agar tidak mempersulit akses tersebut seperti hak paten, hak merek, rahasia dagang, dan lain-lain. Tindakan-tindakan Anggota WTO yang ditujukan bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat serta untuk mengakhiri penyebaran Covid-19 memenuhi syarat sebagai sebuah “*essential security interests*”.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbott, Frederick. "The 'Rule of Reason' and the Right to Health: Integrating Human Rights and Competition Principles in the Context of TRIPS." Dalam *Human Rights and International Trade*, diedit oleh Thomas Cottier, Joost Pauwelyn dan Elisabeth Bürgi Bonanomi, 279–300. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Alvarez, José E. dan Kathryn Khamsi. "The Argentine Crisis and Foreign Investors: A Glimpse into the Heart of the Investment Regime." Dalam *The Yearbook on International Investment Law and Policy 2008/2009*, diedit oleh Karl P. Sauvant, 379–478. New York: Oxford University Press, 2009.
- Blanco, Sebastián Mantilla dan Alexander Pehl. *National Security Exceptions in International Trade and Investment Agreements: Justiciability and Standards of Review*. Cham: Springer International Publishing, 2020.
- Desierto, Diane A. *Necessity and National Emergency Clauses: Sovereignty in Modern Treaty Interpretation*. Leiden: Brill Nijhoff, 2012.
- Dolzer, Rudolf dan Christoph Schreuer. *Principles of International Investment Law*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Dörr, Oliver. "Article 31: General Rule of Interpretation." Dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary*. Ed. 2, diedit oleh Oliver Dörr dan Kirsten Schmalenbach, 557–616. Berlin: Springer, 2018.
- Koul, Autar Krishen. *Guide to WTO and GATT: Economics, Law and Politics*. Singapore: Springer, 2018.
- Linderfalk, Ulf. *On the Interpretation of Treaties: the Modern International Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*. Dordrecht: Springer, 2007.
- Musungu, Sisule. "The Right to Health, Intellectual Property, and Competition Principles." Dalam *Human Rights and International Trade*, diedit oleh Thomas Cottier, Joost Pauwelyn dan Elisabeth Bürgi Bonanomi, 301–310. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Newcombe, Andrew dan Lluís Paradell. *Law and Practice of Investment Treaties*. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009.
- Pelc, Krzysztof J. *Making and Bending International Rules: The Design of Exceptions and Escape Clauses in Trade Law*. New York: Cambridge University Press, 2016.
- Scaria, Arul George dan Kavya Mammen. "Non-Traditional Trademarks in the Pharmaceutical Sector: Non-Traditional Barriers to Access to Medicine?" Dalam *The Protection of Non-traditional Marks: Critical Perspectives*, diedit oleh Irene Calboli dan M.R.F. Senftleben, 271–286. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Van den Bossche, Peter. *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*. Ed. 2. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2008.
- Yannaca-Small, Katia. "Essential Security Interests Under International Investment Law." Dalam *International Investment Perspectives: Freedom of Investment in a Changing World*. s.l.: OECD, 2007. Hlm. 93–134.

JURNAL

- Abbott, Frederick. "The TRIPS Agreement Article 73 Security Exceptions and the COVID-19 Pandemic." Global South Research Paper No. 116 (2020).
- Akande, Dapo dan Sope Williams. "International Adjudication on National Security Issues: What Role for the WTO?" *Virginia Journal of International Law* 43 (2003). Hlm. 365–404.
- Alford, Roger P. "The Self-Judging WTO Security Exceptions." *Utah Law Review* (2011). Hlm. 697–759.
- Baldwin, David A. "The Concept of Security." *Review of International Studies* 23 (1997). Hlm. 5–26.
- Bown, Chad P. dan Joel P. Trachtman. "Brazil—Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres: A Balancing Act." *World Trade Review* 8 (2009). Hlm. 85–135.
- Burke-White, William W. dan Andreas von Staden. "Investment Protection in Extraordinary Times: The Interpretation and Application of Non-precluded Measures Provisions in Bilateral Investment Treaties." *Virginia Journal of International Law* 48 (2008). Hlm. 307–410.
- Cann, Jr., Wesley A. "Creating Standards and Accountability for the Use of the WTO Security Exceptions: Reducing the Role of Power-Based Relations and Establishing a New Balance Between Sovereignty and Multilateralism." *Yale Journal of International Law* 26 (2001). Hlm. 413–485.
- Fidler, David P. "Public Health and National Security in the Global Age: Infectious Diseases, Bioterrorism, and Realpolitik." *The George Washington International Law Review* 35 (2003). Hlm. 787–856.
- Gazzini, Tarcisio. "Necessity in International Investment Law: Some Critical Remarks on *CMS v. Argentina*." *Journal of Energy and Natural Resources Law* 26 (2008). Hlm. 450–469.
- Hahn, Michael J. "Vital Interests and the Law of GATT: An Analysis of GATT's Security Exceptions." *Michigan Journal of International Law* 12 (1991). Hlm. 558–620.
- Kabra, Ridhi. "Return of the Inconsistent Application of the 'Essential Security Interest' Clause in Investment Treaty Arbitration: *CC/Devas v India* and *Deutsche Telekom v India*." *ICSID Review* 34 (2019). Hlm. 723–753.
- Koulen, Mark. "The Non-discriminatory Interpretation of GATT Article XIX(1): A Reply." *Legal Issues of European Integration* 10 (1983). Hlm. 87–111.
- Lee, Jaemin. "Commercializing National Security? National Security Exceptions' Outer Parameter Under GATT Article XXI." *Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy* 13 (2017). Hlm. 277–310.
- Moon, William J. "Essential Security Interests in International Investment Agreements." *Journal of International Economic Law* 15 (2012). Hlm. 481–502.
- Schloemann, Hannes L. dan Stefan Ohlhoff. "'Constitutionalization' and Dispute Settlement in the WTO: National Security as an Issue of Competence." *American Journal of International Law* 93 (1999). Hlm. 424–451.
- Voon, Tania. "The Security Exceptions in WTO Law: Entering a New Era." *AJIL Unbound* 113 (2019). Hlm. 45–50.

DOKUMEN INTERNASIONAL

- Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. Preparatory Committee of the United Nations Conference on Trade and Employment. *Thirty-Third Meeting of Commission A*. E/PC/T/A/PV/33 (1947).
- Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Report of the Tariff Negotiations Working Party*. E/PC/T/135 (1947).
- Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Second Session of the Preparatory Committee of the United Nations Conference on Trade and Employment*. E/PC/T/189 (1947).
- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resolution 2177 (2014). 18 September 2014. S/RES/2177.
- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resolution 2532 (2020). 1 Juli 2020. S/RES/2532.
- Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. *The Right of Everyone to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health*. E/CN.4/2004/49/Add.1. (2004).
- Organisasi Perdagangan Dunia. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). *UNTS* 1869 (1994).
- Organisasi Perdagangan Dunia. General Agreement on Tariffs and Trade 1994. *UNTS* 1867 (1994).
- Organisasi Perdagangan Dunia. General Agreement on Trade in Services. *UNTS* 1869 (1994).
- Perjanjian Antara Pemerintah Republik Mauritius dan Pemerintah Republik India untuk Promosi dan Perlindungan Investasi (Agreement between the Government of the Republic of Mauritius and the Government of the Republic of India for the Promotion and Protection of Investments). 8 September 1998.
- Perjanjian Antara Republik India dan Republik Federal Jerman untuk Promosi dan Perlindungan Investasi (Agreement between the Republic of India and the Federal Republic of Germany for the Promotion and Protection of Investment). 10 Juli 1995.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. *UNTS* 993 (1966).
- Traktat antara Amerika Serikat dan Republik Argentina mengenai Dorongan Timbal Balik dan Perlindungan Investasi (Treaty between the United States of America and the Argentine Republic Concerning the Reciprocal Encouragement and Protection of Investment). 14 November 1991.
- WTO Ministerial Conference. *Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health, Fourth Session, Doha, 9–14 November 2001*. WT/MIN(01)/DEC/2 (2001).
- WTO-DSB. *Canada—Additional Duties on Certain Products from the United States*. Request for the Establishment of a Panel by the United States. WT/DS557/2 (2018).
- WTO-DSB. *Russia—Measures Concerning Traffic in Transit*. Request for the Establishment of a Panel by Ukraine. WT/DS512/3 (2017).

WTO-DSB. *United Arab Emirates—Measures Relating to Trade in Goods and Services, and Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Request for the Establishment of a Panel by Qatar. WT/DS526/2 (2017).

WTO-DSB. *United States—Certain Measures on Steel and Aluminium Products*. Request for the Establishment of a Panel by Norway. WT/DS552/10 (2018).

PUTUSAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA

GATT. *European Economic Communities—Regulation on Imports of Parts and Components*. Panel Report. L/6657 - 37S/132 (16 May 1990).

GATT. *Thailand—Restrictions on Importation of and Internal Taxes on Cigarettes*. Panel Report. DS10/R - 37S/200 (7 November 1990).

GATT. *United States—Measures Affecting Alcoholic and Malt Beverages*. Panel Report. DS23/R - 39S/206 (19 Juni 1992).

GATT. *United States—Restrictions on Imports of Tuna*. Panel Report. DS21/R - 39S/155 (3 September 1991).

GATT. *United States—Section 337 of the Tariff Act of 1930*. Panel Report. BISD 36S/345 (7 November 1989).

ICSID *Enron Corp. and Ponderosa Assets L. P. v Argentina*. Decision on the Application for Annulment of the Argentine Republic. Case No. ARB/01/3 (30 Juli 2010).

ICSID. *CMS Gas Transmission Company v Argentina*. Award. Case No. ARB/01/8 (12 Mei 2005).

ICSID. *CMS Gas Transmission Company v Argentina*. Decision of the Ad Hoc Committee on the Application for Annulment of the Argentine Republic. Case No. ARB/01/8 (25 September 2007).

ICSID. *Continental Casualty Co. v Argentina*. Award. Case No. ARB/03/9 (5 September 2008).

ICSID. *Continental Casualty Co. v Argentina*. Decision on the Application for Partial Annulment of Continental Casualty Company and the Application for Partial Annulment of the Argentine Republic. Case No. ARB/03/9 (16 September 2011).

ICSID. *El Paso Energy International Co. v Argentina*. Award. Case No. ARB/03/5 (31 Oktober 2011).

ICSID. *El Paso Energy International Co. v Argentina*. Decision of the Ad Hoc Committee on the Application for Annulment of the Argentine Republic. Case No. ARB/03/5 (22 September 2014).

ICSID. *Enron Corp. and Ponderosa Assets L. P. v Argentina*. Award. Case No. ARB/01/3 (22 Mei 2007).

ICSID. *LG&E Energy Corp. et al. v Argentina*. Decision on Liability. Case No. ARB/02/1 (3 Oktober 2006).

ICSID. *Mobil Exploration and Development Argentina Inc. Suc. Argentina and Mobil Argentina S.A. v Argentina*. Decision on Jurisdiction and Liability. Case No. ARB/04/16 (10 April 2013).

- ICSID. *Mobil Exploration and Development Argentina Inc. Suc. Argentina and Mobil Argentina S.A.*. Decisión sobre la solicitud de anulación de la República Argentina. Case No. ARB/04/16 (8 Mei 2019).
- ICSID. *Sempra Energy International v Argentina*. Award. Case No. ARB/02/16 (28 September 2007).
- ICSID. *Sempra Energy International v Argentina*. Decision on the Argentine Republic's Application for Annulment of the Award. Case No. ARB/02/16 (20 Juni 2010).
- Mahkamah Internasional. *Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France)*. Judgment. ICJ Reports 2008.
- PCA. *CC/Devas (Mauritius) Ltd., Devas Employees Mauritius Private Ltd. and Telecom Devas Mauritius Ltd. v India*. Award on Jurisdiction and Merits. Case No. 2013-0 (25 July 2016).
- PCA. *Deutsche Telekom AG v India*. Interim Award. Case No. 2014-10 (13 December 2017).
- WTO-DSB. *Australia—Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging*. Panel Report. WT/DS435/R; WT/DS441/R; WT/DS458/R; WT/DS467/R (28 Juni 2018).
- WTO-DSB. *Brazil—Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres*. Appellate Body Report. WT/DS332/AB/R (3 Desember 2007).
- WTO-DSB. *European Communities—Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products*. Appellate Body Report. WT/DS135/AB/R (12 Maret 2001).
- WTO-DSB. *Korea—Measures Affecting Imports of Fresh, Chilled and Frozen Beef*. Appellate Body Report. WT/DS161/AB/R dan WT/DS169/AB/R (11 Desember 2000).
- WTO-DSB. *Russia—Measures Concerning Traffic in Transit*. Panel Report. WT/DS512/R (26 April 2019).
- WTO-DSB. *Saudi Arabia—Measures Concerning the Protection of Intellectual Property Rights*. Panel Report. WT/DS567/R (16 Juni 2020).
- WTO-DSB. *United States—Measures Affecting the Cross-Border Supply of Gambling and Betting Services*. Appellate Body Report. WT/DS285/AB/R (7 April 2005).

INTERNET

- Abboud, Leila, Michael Peel dan Hannah Kuchler. *Macron Summons Sanofi Chief for Claim US Has “Right To” First Covid-19 Jab*. <https://www.ft.com/content/60434224-a70d-4a8d-821f-6ac239b4a349>. Diakses tanggal 24 Desember 2021.
- Branswell, Helen. *As Coronavirus Pandemic Worsens, Health Officials Fear Nationalization of Drugs and Supplies*. <https://www.statnews.com/2020/03/15/as-coronavirus-pandemic-worsens-health-officials-fear-nationalization-of-drugs-and-supplies/>. Diakses tanggal 24 Desember 2021.
- Columbia Public Health. *Epidemic, Endemic, Pandemic: What are the Differences?* <https://www.publichealth.columbia.edu/public-health-now/news/epidemic-endemic-pandemic-what-are-differences>. Diakses tanggal 24 Desember 2021.

- Correa, Carlos. *COVID-19 Pandemic: Access to Prevention and Treatment Is a Matter of National and International Security*. <https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Open-Letter-REV.pdf>. Diakses tanggal 24 Desember 2021.
- EIFL. *COVID and Copyright: The Right to Research*. <https://www.eifl.net/blogs/covid-and-copyright-right-research>. Diakses tanggal 24 Desember 2021.
- European Commission. *Belgian Court Orders AstraZeneca to Deliver Vaccine Doses to the EU*. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_3107. Diakses tanggal 24 Desember 2021.
- International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Association. *Pharma Partners in Efforts to Give Coronavirus Vaccine for Everyone*. <https://www.ifpma.org/resource-centre/pharma-partners-in-efforts-to-give-coronavirus-vaccine-for-everyone/>. Diakses tanggal 24 Desember 2021.
- Levine, David S. *COVID-19 Trade Secrets and Information Access: An Overview*. <http://infojustice.org/archives/42493>. Diakses tanggal 24 Desember 2021.
- McKinsey & Company. *COVID-19: Implications for Business*. <https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business#>. Diakses tanggal 24 Desember 2021.
- Muller, Benjamin. *Vaccines Bring Rich Nations Back to Life as Covid Ravages Poorer Countries* <https://www.nytimes.com/2021/05/05/world/europe/coronavirus-covax-vaccination.html>. Diakses tanggal 24 Desember 2021.
- National Institute for Health Research. *COVID-19 Vaccine and Therapies Research Boosted by Six New Projects in £10.5 Million Rapid Funding Round*. <https://www.nihr.ac.uk/news/covid-19-vaccine-and-therapies-research-boosted-by-six-new-projects-in-105-million-rapid-funding-round/24489>. Diakses tanggal 24 Desember 2021.
- Our World in Data. “Coronavirus (COVID-19) Vaccinations - Statistics and Research.” <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations>. Diakses tanggal 24 Desember 2021.
- The Economist. *Mariana Mazzucato, Jayati Ghosh and Els Torreale on waiving covid patents*. <https://www.economist.com/by-invitation/2021/04/20/mariana-mazzucato-jayati-ghosh-and-els-torreale-on-waiving-covid-patents>. Diakses tanggal 24 Desember 2021.
- United Nations Commission on Trade and Development. *International Investment Agreements Navigator*. <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements>. Diakses tanggal 24 Desember 2021.
- United Nations Development Programme. *COVID-19: Looming Crisis in Developing Countries Threatens to Devastate Economies and Ramp Up Inequality*. https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/COVID19_Crisis_in_developing_countries_threatens_devastate_economies.html. Diakses tanggal 24 Desember 2021.
- United Nations Secretary-General. *Secretary-General's remarks to the Security Council on the COVID-19 Pandemic [as delivered]*. <https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-04-09/secretary-generals-remarks-the-security-council-the-covid-19-pandemic-delivered>. Diakses tanggal 24 Desember 2021.

- United States Department of Defense. *Coronavirus: Operation Warp Speed*. <https://www.defense.gov/Explore/Spotlight/Coronavirus/Operation-Warp-Speed/>. Diakses tanggal 24 Desember 2021.
- Washington Post. *Preserving Intellectual Property Barriers to COVID-19 Vaccines Is Morally Wrong and Foolish*. <https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/04/26/preserving-intellectual-property-barriers-covid-19-vaccines-is-morally-wrong-foolish/>. Diakses tanggal 24 Desember 2021.
- World Health Organization. *Emergencies: International Health Regulations and Emergency Committees*. <https://www.who.int/news-room/q-a-detail/emergencies-international-health-regulations-and-emergency-committees>. Diakses tanggal 24 Desember 2021.
- World Health Organization. *Novel Coronavirus*. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10-ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480_2#:~:text=The%20final%20name%20of%20the,on%20Taxonomy%20of%20Viruses. Diakses tanggal 24 Desember 2021.
- World Health Organization. *Timeline of WHO's Response to COVID-19*. <https://www.who.int/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline>. Diakses tanggal 24 Desember 2021.
- World Health Organization. *WHO Director-General Commends United States Decision to Support Temporary Waiver on Intellectual Property Rights for Covid-19 Vaccines*. <https://www.who.int/news/item/05-05-2021-who-director-general-commends-united-states-decision-to-support-temporary-waiver-on-intellectual-property-rights-for-covid-19-vaccines>. Diakses tanggal 24 Desember 2021.
- World Health Organization. *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 2 July 2021*. <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-2-july-2021>. Diakses tanggal 24 Desember 2021.
- World Health Organization. *WHO Director-General's Opening Remarks at the Media Briefing on COVID-19 - 11 March 2020*. <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>. Diakses tanggal 24 Desember 2021.
- World Health Organization. *WHO Director-General's statement on IHR Emergency Committee on Novel Coronavirus (2019-nCoV)*. [https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-ihremergency-committee-on-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-ihremergency-committee-on-novel-coronavirus-(2019-ncov)). Diakses tanggal 24 Desember 2021.
- World Trade Organization. *Article XX General Exceptions, Analytical Index of GATT*. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/gatt_ai_e/art20_e.pdf. Diakses tanggal 24 Desember 2021.
- World Trade Organization. *RTAs in force*. <http://rtais.wto.org/UI/PublicAllRTAList.aspx>. Diakses tanggal 24 Desember 2021
- World Trade Organization. *Waiver from Certain Provisions of the TRIPS Agreement for the Prevention, Containment and Treatment of Covid-19: Communication from India and South Africa*.

<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True>. Diakses tanggal 24 Desember 2021.